

**SKRIPSI**  
**PROGRAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK**  
**PEMBANGUNAN MASYARAKAT**  
**(Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)**

Skripsi  
Program Sarjana (S-1)  
Jurusan Sosiologi



Oleh:  
**Choirur Rijal**  
1506026024

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2019**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 5 (Lima) ekslampar  
Hal : Persetujuan Naskah  
Skripsi

Kepada.  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan Perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi:

Nama : Choirur Rijal  
NIM : 1506026024  
Jurusan : Sosiologi  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Juni 2019...

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata tulis

Bidang Subtansi Materi



Dr. Moh. Fauzi, M, Ag.

NIP. 197205171998031003

Tanggal : 11/7 2019



Endang Supriadi, M. A

Tanggal : 27/6 2019

**SKRIPSI**

**PROGRAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)**

Disusun Oleh:  
Choirur Rijal  
1506026024

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
pada tanggal 25 Juli 2019 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag  
NIP. 19760407 200112 1 003

Sekretaris



Endang Supriadi, MA

Penguji I



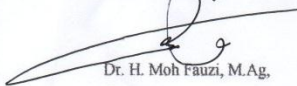
Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum  
NIP. 19620107 199903 2 001

Penguji II



Ririn Megah Safitri, MA

Pembimbing I



Dr. H. Moh Fauzi, M.Ag.  
NIP. 19720517 199803 1 003

Pembimbing II



Endang Supriadi, MA

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja keras saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 JULI 2019 .....

Tanda Tangan



Choirur Rijal

1506026024

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga sampai saat ini nikmat iman masih melekat di dalam diri kita dan nikmat sehat masih dapat kita rasakan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad S.A.W yang Insyaallah memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti.

Segala Puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan oleh-NYA, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan guna menyelesaikan program Strata 1 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tentu, dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah berjasa, sehingga dapat selesai dengan baik. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Muhyar Fanani M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Politik dan seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. H. M. Parmudi selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Bapak Drs. Sugiarto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan kebijakan terkait kelancaran skripsi ini.
4. Bapak Dr. Moh. Fauzi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Endang Supriadi, M.A yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.
5. Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah melayani peminjaman buku akademik.
6. Segenap Pengasuh dan santri-santri Pesantren Bina Insani
7. Semua teman-teman LUBIS 2015 yang telah mengajarkan arti persahabatan yang sejati.
8. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang telah mengajarkan banyak hal termasuk semangat untuk terus berjuang.
9. Semua teman-teman angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo, terutama kepada angkatan Sosiologi A 2015.

10. Serta seluruh orang-orang yang telah memberikan motivasi, dukungan dan inspirasi dalam hidupku.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Selain itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran untuk skripsi ini sangat dibutuhkan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Semarang,  
Peneliti,

Choirur Rijal  
1506026024

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T

Sholawat dan Salam, Semoga tetap tercurahkan Kepada Nabi  
Agung Muhammad S.A.W

Karya Kecilku ini Kupersembahkan untuk keluargaku:

Kedua Orang Tuaku (Ibu Siti Maskanah dan Bapak Suwito)

Adikku tercinta (Adinda Siti Dewi Masithoh).



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatukaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.

( QS.Ar- Ra'd :11)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, (PT Syaamil Cipta Media: Bandung, 2005), hal 368.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dana desa yang didapat di Desa Sidoluhur berjumlah sangat besar setiap tahunnya. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidoluhur selalu monoton. Artinya, pembangunan desa dilakukan dengan cara membangun infrastruktur yang setiap tahun sama misal, pembangunan jalan, gorong-gorong dan lain sebagainya. Padahal, terdapat aspek pembangunan lain yang dapat dilaksanakan, sehingga pembangunan dapat lebih dinamis dan merata ke semua aspek di Desa Sidoluhur.

Pendekatan penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada informan di lapangan. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Subjek di dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Sidoluhur, tomas toga toda (tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda), dan warga Desa Sidoluhur. Penelitian ini menggunakan analisis gender sebagai kerangka teori. Adapun analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Peneliti membuat singkatan dan menyeleksi data yang diperoleh di lapangan. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis disertai dengan tabel sebagai pendukung sajian data. Setelah pengumpulan data berakhir, tindakan peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan dirasa kurang mantap maka peneliti akan menggali *fieldnote* (catatan lapangan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sudah berjalan massif di Desa Sidoluhur. Pembangunan yang selalu gencar dilakukan adalah infrastruktur. Akan tetapi, pembangunan tersebut tidak hanya infrastruktur yang berkaitan dengan akses mobilitas, akan tetapi pemerintah juga membangun infrastruktur yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, budaya dan olahraga. Meskipun

demikian, pembangunan di Desa Sidoluhur selalu terjadi pengulangan setiap tahunnya. Pemerintah Desa Sidoluhur kurang memiliki inisiasi ataupun inovasi dalam memunculkan program-program yang dapat menunjang potensi masyarakat. Oleh sebab itu, musyawarah semua pihak di Desa Sidoluhur, baik pemerintah desa maupun masyarakat harus ditingkatkan sehingga program-program unggul akan muncul dan dapat memberikan dampak pada kemajuan desa.

**Kata Kunci:** Program, Pemanfaatan, Dana Desa, Pembangunan

## ABSTRACT

*This research is motivated by the large amount of village funds obtained in Sidoluhur Village each year. However, the development carried out by the Sidoluhur Village government is always monotonous. That is, village development is carried out by building infrastructure that is the same every year for example, road construction, culverts and so forth. In fact, there are other aspects of development that can be implemented, so that development can be more dynamic and equitable to all aspects of Sidoluhur Village.*

*This research approach is descriptive qualitative. While the type of research that researchers use is case studies. Data collection is done by the method of observation, interviews, and documentation. Primary data was obtained by conducting in-depth interviews with informants in the field. While secondary data obtained from documents related to this study. The subjects in this study were the government of Sidoluhur Village, tomas toga toda (community leaders, religious leaders and youth leaders), and residents of Sidoluhur Village. This study uses gender analysis as a theoretical framework. The data analysis used is an interactive data analysis technique. Researchers make abbreviations and select data obtained in the field. Then followed by the preparation of data presentations in the form of systematic stories accompanied by tables as supporting data presentation. After the data collection is over, the next action is to draw conclusions deemed not stable so the researcher will explore the field notes (field notes).*

*The results of this study indicate that the development has been going on massive in Sidoluhur Village. Development that is always intensively carried out is infrastructure. However, the development is not only infrastructure related to access mobility, but the government is also building infrastructure related to education, economy, culture and sports. Nevertheless, development in Sidoluhur Village always repeats every year. Sidoluhur Village Government*

*lacks initiation or innovation in bringing up programs that can support the potential of the community. Therefore, the deliberation of all parties in Sidoluhur Village, both the village government and the community must be increased so that superior programs will emerge and can have an impact on the progress of the village.*

***Keywords:*** *Program, Utilization, Village Fund, Development*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori .....	18
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis dan Pendekatan.....	25
2. Definisi Operasional.....	26
3. Sumber dan Jenis Data .....	30
4. Teknik Pengambilan Data .....	30
5. Teknis Analisis Data .....	32

H. Sistematika Penulisan .....	34
--------------------------------	----

## **BAB II : DANA DESA DAN PEMBANGUNAN**

A. Dana Desa .....	36
1. Konsep Dana Desa .....	35
2. Tujuan dan Fungsi Dana Desa .....	36
3. Penggunaan Dana Desa .....	37
4. Mekanisme Penyaluran ADD .....	39
5. Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD .....	40
6. Pengawasan .....	40
B. Pembangunan .....	38
1. Konsep Pembangunan .....	41
2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	45
3. Jenis Perencanaan Pembangunan .....	45
4. Strategi Pembangunan Daerah .....	47
5. Partisipasi dalam Pembangunan Desa .....	47
6. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah .....	48

## **BAB III: GAMBARAN UMUM**

A. Kondisi Geografis .....	52
B. Kondisi Demografi .....	54
1. Jumlah Penduduk .....	54
2. Masyarakat Desa Sidoluhur Berdasarkan Agama .....	55
3. Pendidikan Masyarakat Desa Sidoluhur .....	58
4. Kondisi Ekonomi	

Masyarakat Desa Sidoluhur .....	62
5. Kondisi Sosial Budaya Desa Sidoluhur .....	64
C. Struktur Desa Sidoluhur Tahun 2019	
1. Struktur Pemerintah Desa Sidoluhur .....	65
2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa.....	67
3. Tugas dan Wewenang Perangkat Desa.....	68

#### **BAB IV: IMPLEMENTASI DANA DESA**

A. Pemanfaatan Dana Desa .....	58
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	78
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa .....	80
3. Bidang Pembinaan Masyarakat.....	81
4. Meningkatkan Gotong Royong Masyarakat Desa .....	82
B. Aspek-Aspek Pembangunan yang Didanai Dana Desa.....	70
1. Pembangunan Jalan untuk Mobilitas.....	92
2. Pembangunan dalam Aspek Kesehatan.....	93
3. Pembangunan dalam Aspek Pendidikan .....	94
4. Pembangunan dalam Aspek Peningkatan Ekonomi .....	97
5. Pembangunan dalam Aspek Keolahragaan.....	104



**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Sidoluhur Tahun 2019 .....	54
Tabel 3.2 Fasilitas Keagamaan Desa Sidoluhur .....	55
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sidoluhur .....	59
Tabel 3.4 Fasilitas Jenjang Pendidikan di Desa Sidoluhur .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Arah positif yang disengaja atau disadari yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.<sup>3</sup>

Selain itu, pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm 209-210.

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama), Hlm 1.

Sedangkan masyarakat diartikan sebagai kelompok warga yang terdapat di sebuah desa, kota dengan suku atau bangsa tertentu. Pada hakekatnya, masyarakat mulai terbentuk ketika sekumpulan orang dalam jumlah kecil atau besar hidup bersama memenuhi ragam kebutuhan di suatu wilayah dengan batas geografis yang jelas.<sup>4</sup>

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan masyarakat adalah percampuran antara pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

Program-program dalam pembangunan masyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis, kebutuhan harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan hanya keinginan beberapa orang baik tokoh masyarakat maupun kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Pembangunan masyarakat mengandung

---

<sup>4</sup>Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 2.

<sup>5</sup>Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 116.

upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip<sup>6</sup>:

- a. Transparansi (keterbukaan);
- b. Partisipasi;
- c. Dapat dinikmati masyarakat;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas);
- e. Berkelanjutan (sustainable).

Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama Alokasi Dana Desa. Alokasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Setiap desa mendapatkan dana alokasi dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen di luar dana transfer daerah setiap bulannya. Dengan demikian, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan Undang-undang Desa yaitu, 10 persen dari transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp59,2 triliun, ditambah dengan dana APBD sebesar 10

---

<sup>6</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 220.

persen sekitar Rp45, 4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. Dengan alokasi dana desa yang besar, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akuntabel.<sup>7</sup>

Pada tahun 2015, beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Sidoluhur dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunannya. Adapun program yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah program pembangunan TPT, pengerasan jalan, pelebaran jalan, dan pembangunan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

Sedangkan kurun waktu tahun 2016-2018, digunakan untuk melanjutkan pemerataan program pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat dan pengembangan ekonomi produktif diantaranya yaitu, pemerataan pembangunan TPT, pembangunan PMT dan pengembangan BUMDES. Adapun pembangunan infrastruktur baru yang sudah dilaksanakan adalah pemadatan jalan lingkungan, pembangunan rabat beton, dan pembangunan gorong-gorong. Setelah 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Desa dapat menjalankan program secara maksimal dibandingkan sebelum adanya dana desa.

---

<sup>7</sup> Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, *Kajian Dana Desa di Jawa Tengah*, (Jakarta; Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2018), hlm 6.

Upaya-upaya pembangunan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoluhur baik sebelum maupun setelah adanya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka membahas pembangunan yang progresif, efektif dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak hanya diajak untuk merencanakan pembangunan desa, akan tetapi juga dalam hal pelaksanaannya. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam membangun infrastruktur desa. Dari kegiatan tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada temuan peneliti pra-penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembangunan infrastruktur di Desa Sidoluhur selalu monoton setiap tahunnya misal, pembangunan jalan, gorong-gorong dan sebagainya. Jika model pembangunan seperti itu, maka pembangunan tersebut tidak memiliki perubahan yang signifikan terhadap kemajuan desa. Sedangkan potensi masyarakat di aspek lain memiliki peluang untuk ditingkatkan. Namun pemerintah desa belum memberikan perhatian lebih kepada masyarakat terkait potensi tersebut. Salah satu contoh mengingat kebanyakan mata pencaharian masyarakat bersumber dari pertanian, tentu para petani membutuhkan irigasi untuk kemudahan dalam bekerja. Namun pemerintah belum memandang itu sebuah program yang penting, sehingga

masyarakat harus lebih banyak mengeluarkan biaya dan waktu untuk mengolah pertaniannya.

Melalui permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait program pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti melakukan riset dengan mengambil judul *“Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dana desa dan pembangunan?
2. Bagaimana implementasi dana desa dalam pembangunan?

## **C. TUJUAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dana desa dan pembangunan
2. Untuk mengetahui implementasi dana desa untuk pembangunan



## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa yang akan meneliti terkait dengan Pemanfaatan Dana Desa. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi dasar pemikiran serta memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bidang pendidikan pada umumnya. Sebagai acuan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan realita-realita yang masih menjadi permasalahan tentunya yang berkaitan dengan ‘‘Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat’’.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang ‘‘Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Masyarakat’’ merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada sembilan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Skripsi M. Indra Maulana yang berjudul ‘‘Peran Dana Desa dalam Memberdayakan

*Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam; (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*”.<sup>8</sup> Kalau kebanyakan penelitian tentang dana desa membahas dampak dana desa terhadap pembangunan fisik desa, maka berbeda dengan penelitian lain, justru penelitian ini membahas tentang peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian, dampak adanya dana desa sudah dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya berjalan sesuai pedoman teknis dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pembangunan infrastruktur di Desa Sinar Palembang berjalan signifikan. Setiap tahun, pembangunan infrastruktur dilakukan secara massif dengan melibatkan sebagian masyarakat di dalamnya seperti pembangunan jalan, gorong-gorong dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan sebelum adanya dana desa yang pembangunannya belum berjalan efektif seperti masih banyak ditemukannya jalan yang rusak di desa. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kekurangan yaitu, belum mampu menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam secara komprehensif. Justru peneliti terlalu banyak membahas pembangunan fisik desa, namun

---

<sup>8</sup> M. Indra Maulana, *Skripsi Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (study kasus di desa sinar Palembang kec. candipuro, kab. lampung selatan)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018) hlm 1.

melupakan pemberdayaan masyarakat yang merupakan inti dari penelitian ini.

Skripsi Rivan Nugraha FISIP UIN Sunan Gunung Jati yang berjudul “*Peran Program Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)*”.<sup>9</sup> Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa: *pertama*, pemberdayaan sebelum adanya dana desa tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masih belum merata. Hal ini dapat dilihat pembangunan jalan yang masih belum merata dan masih banyak kerusakan di beberapa wilayah. Faktornya adalah *pertama*, terbatasnya anggaran yang tersedia. *Kedua*, program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dimulai dari aspek fisik, seperti pembangunan jalan dan jembatan di perkampungan, pembangunan pasar tradisional, pembangunan Posyandu, pengadaan satu unit mobil ambulance, serta adanya program pengelolaan sampah. *Ketiga*, Partisipasi masyarakat Desa Tanggeung dapat ditinjau dari antusiasnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sampai antusias warga dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang telah disepakati bersama. Kelebihan penelitian ini adalah mampu

---

<sup>9</sup>RivanNugraha, *Peran Program Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)*, (Bandung: UIN Sunan Gunungjati), hlm 1.

menganalisa permasalahan masyarakat baik sebelum maupun sesudah adanya dana desa. Kekurangan penelitian ini adalah penelitian ini tidak fokus dalam program pemberdayaan masyarakat.

Artikel jurnal Intan Mala Sari dan M. Faisal Abdullah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berjudul “*Analisis Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung*”.<sup>10</sup> Berdasarkan uji secara parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji f), terdapat 13 desa dari proyeksi 127 desa di Kabupaten Tulungagung, Dana Desa dan Anggaran Dana Desa efektif dalam mengurangi kemiskinan yaitu, Jengglunharjo, Wateskroyo, Tanggulwelahan, Tanggunggunung, Pakisrejo, Ngrejo, Ngepoh, Suwaluh, Kresikan, Gombang, Tengharejo, Besole, dan Kasreman. Sedangkan 114 desa sisanya, tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan desa tersebut. Hal ini disebabkan 84% Dana Desa digunakan dalam pembangunan fisik. Sementara, penggunaan bagi pemberdayaan masyarakat masih sangat minim yaitu, sebesar 6,5 persen. Selain itu, prasarana dan sarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan maupun dari segi perencanaan dan pengelolaannya. Kekurangannya adalah penelitian ini menganalisis kebijakan Dana Desa akan tetapi

---

<sup>10</sup> Intan Mala Sari dan M. Faisal Abdullah, *Analisis Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, No.01 (Juni 2017), hlm 1.

tidak mencantumkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan. Selain itu, peneliti hanya menyuguhkan data hasil penelitian namun tidak memberikan solusi atas kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

Artikel jurnal dari Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”.<sup>11</sup> Dari hasil penelitian, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonorejo tidak sesuai dengan tujuan awalnya yaitu, untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Justru ADD tersebut digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan efektif. Selain itu, sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang sangat tinggi, namun dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik. Kelebihan penelitian ini adalah sistematika pemikirannya sangat sistematis dan rinci seperti mulai perencanaan ADD, penganggaran ADD, mekanisme pencarian dan penyaluran ADD, mekanisme pencairan dan penyaluran ADD,

---

<sup>11</sup> Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212.

penggunaan ADD, pengawasan ADD, pertanggungjawaban ADD, hingga faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ADD. Sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya kritik sehingga seolah-olah penelitian ini tidak objektif.

Artikel Jurnal Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah yang berjudul “*Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*”.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan yaitu: *pertama*, kebijakan Program Dana Desa (DD) di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berjalan cukup efektif, hal ini dapat ditinjau dari kegiatan program Dana Desa berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. *Kedua*, perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian. Adapun saran untuk untuk meningkatkan efektifitas

---

<sup>12</sup> Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah, *Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, *Agri SosioEkonomiUnsrat*, ISSN 1907– 4298 ,Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335 – 342.

Dana Desa yaitu: *Pertama*, sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Dana Desa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Dana Desa serta ikut mengawasi jalannya Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada. *Kedua*, para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan desa.

Artikel Jurnal Helen Florensi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga yang berjudul “*Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*”.<sup>13</sup> Dari hasil penelitian, terdapat 3 tahap dalam memberdayakan masyarakat Desa Cerme. *Pertama*, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Pada tahap ini, pelaku pemberdayaan memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. *Kedua*, transformasi kemampuan. Pada tahap ini, masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekadar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja,

---

<sup>13</sup> Helen Florensi, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2, No.1 (Januari 2014), hlm 1.

belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan di Desa Cerme. *Ketiga*, peningkatan kemampuan. Tahap ini merupakan tahap yang berorientasi dalam peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan, supaya masyarakat dapat mandiri. Adapun kelebihan penelitian ini adalah mampu memberikan gambaran tahap-tahap pemberdayaan yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangan penelitian ini adalah belum mampu meyakinkan pembaca karena banyaknya kata “mungkin”, sehingga seolah-olah peneliti tidak yakin dengan penelitiannya. Selain itu, penelitian ini juga terkesan tidak objektif karena tidak mencantumkan kritik terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa Cerme.

Artikel Jurnal dari Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas STIE PGRI Dewantara Jombang yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”.<sup>14</sup> Akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Dapurkejambon sudah disusun sesuai PTO (Petunjuk Teknis Pembangunan) dan Peraturan Bupati dan dimusyawarahkan dalam rapat BPD dan Pemerintah Desa. Sedangkan, pelaksanaannya sudah sesuai RKA (Rencana

---

<sup>14</sup> Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3, No. 1 (Juni 2015), hlm 1.



Kerja dan Anggaran) dan DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) dan dipertanggungjawabkan dengan masing-masing lembaga desa/ masyarakat. Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapurkejambon Tahun 2014, bahwa pemanfaatan alokasi dana desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan saluran batu kali, terbukti dengan adanya berita acara yang menjelaskan bahwa pihak pertama yaitu pemerintah desa sudah menyerahkan dana ADD tahun anggaran sebesar Rp.63.516.000,00. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, masyarakat turut ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, namun dalam pemberdayaan masyarakat Dapurkejambon dalam program pelatihan-pelatihan sangat minim minat dari masyarakat. Kelebihan penelitian ini adalah dapat memfokuskan pada 2 objek penelitian yaitu, pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Kekurangan penelitian ini adalah tidak mencantumkan berkas-berkas atau bukti LPJ alokasi dana desa. Selain itu, memberikan kritik pada pemerintah desa namun tidak memberikan solusi atas permasalahannya.

Artikel Jurnal Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berjudul *“Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tetelesi Sorowi*

*Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara*".<sup>15</sup> Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk perencanaan dana desa. Namun, penentuan perencanaan kegiatan atau program lebih didominasi oleh pemerintah desa. Kepala desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan dana desa. LPJ merupakan bukti konkret transparansi pengeluaran, pendapatan yang dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa melalui camat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa. Adapun kelebihan penelitian ini adalah berani mengkritik secara keseluruhan subjek penelitian baik perangkat desa maupun masyarakat biasa. Kekurangan penelitian ini adalah tidak ada solusi yang konkret dari penulis.

Artikel Jurnal dari Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, dan Mardha Adhi Pratama FISIP Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul

---

<sup>15</sup> Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 10, No. 1 (Juni 2018), hlm 1.

“*Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo*”.<sup>16</sup> Pemanfaatan dana desa di Desa Bangunjiwo berjalan efektif untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Peran aktif pemerintah desa dianggap mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Bangunjiwo. Berdasarkan penelitian, faktor penyebab perekonomian desa naik adalah partisipasi masyarakat desa dalam musrenbang, sehingga pemberdayaan berjalan baik. Dalam konteks ini, masyarakat juga bebas memberikan kritik, masukan dan saran kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa mampu mengevaluasi kinerjanya. Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah fokus pada variabel penelitian sehingga tidak melenceng dari objek penelitian. Kekurangannya adalah tidak ada kritikan dan cenderung hanya menyanjung objek penelitian.

Penelitian-penelitian di atas, membahas tentang dana desa dan pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan objek yang akan menjadi fokus penelitian peneliti. Walaupun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut; *pertama*, penelitian ini tidak hanya

---

<sup>16</sup> Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, dan Mardha Adhi Pratama, *Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo* *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, Volume 5, No. 1 (Juli 2017), hlm 1.

fokus membahas program-program pembangunan fisik desa namun juga fokus membahas pembangunan masyarakat sebagai upaya jangka panjang dalam menangani masalah-masalah masyarakat desa. *Kedua*, penelitian ini tidak hanya membahas hambatan dan solusi alokasi dana desa, akan tetapi juga membahas tentang program-program pemanfaatan dana desa (untuk fisik desa dan pemberdayaan masyarakat) dan dampaknya. *Ketiga*, penelitian ini akan membahas tentang program pembangunan yang berkaitan dengan kemiskinan dan dampaknya bagi ekonomi masyarakat desa. *Keempat*, peneliti akan memberikan kritik dan juga solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Fungsionalisme Struktural**

Dari tahun 1930-an, Fungsionalisme struktural adalah pendekatan teoretis yang dominan dalam Sosiologi Amerika. Fungsionalis menciptakan konsep-konsep penting, seperti peran, norma, dan terlebih pada konsep fungsionalis, misal model peran. Namun, fungsionalisme struktural terkenal bukan karena konsep spesifik yang diperkenalkannya, tetapi lebih kepada kerangka metatheoris yang menjadi dasarnya. Fungsionalis struktural membayangkan masyarakat sebagai suatu sistem bagian yang saling terkait, dan menekankan

bagaimana bagian yang berbeda bekerja bersama untuk kebaikan sistem. Gambaran fungsional struktural klasik masyarakat adalah dari suatu organisme, seperti tubuh, dengan anggota tubuh yang berbeda-beda, otak, hati, dan sebagainya-bekerja bersama dalam cara yang saling bergantung.<sup>17</sup> Jadi, antara komponen satu dengan yang lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, fungsionalis struktural menekankan sistem di dalam sistem. Misalnya, sementara setiap keluarga dapat dianggap sebagai sistem atau unitnya sendiri, ia juga merupakan komponen masyarakat secara keseluruhan. Komponen utama masyarakat lainnya termasuk ekonomi-sistem untuk menyediakan barang dan jasa kepada anggota masyarakat: pemerintah (atau ranah politik)-sistem yang memberikan nilai-nilai inti dan rasa makna kepada individu. Singkatnya, untuk fungsionalis struktural, sama seperti tubuh adalah sistem dengan bagian-bagian tertentu (misalnya, anggota tubuh, otak, hati, dan lain-lain) yang memastikan fungsi keseluruhannya, demikian juga masyarakat adalah sistem dengan bagian tertentu (keluarga, pemerintah, ekonomi, agama, dan lain-lain) yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara masing-masing komponen ini dapat dan harus dipelajari secara terpisah untuk memahami

---

<sup>17</sup> Scott Appelrouth, Laura Desfor Edles, *Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings*, (California: SAGE Publications, Inc), Page 347.

mereka secara menyeluruh, bagaimana berbagai sistem dan subsistem saling melakukan penetrasi dan bekerja bersama cenderung menjadi perhatian fungsionalis struktural utama.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, menjadi penting memunculkan kekuatan motivasional untuk menjaga atau mempertahankan suatu struktur.<sup>19</sup>

Menurut Parsons, sistem sosial berfungsi untuk pemeliharaan atau merusak struktural dengan pola-pola tertentu. Selain itu, proses transisi khas dari satu pola struktural ke struktural yang lain. Mekanisme seperti itu merupakan generalisasi empiris tentang operasi “kekuatan” motivasi dalam kondisi sistem sosial sedang bermasalah. Generalisasi sangat bervariasi. Terkadang kita hanya tahu secara empiris bahwa generalisasi ini pasti berhasil. Namun dalam kasus lain, mungkin generalisasi semacam ini tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Oleh sebab itu, generalisasi harus diimbangi dengan evaluasi dari masing-masing peran di dalam suatu struktur, sehingga akan terbentuk semacam pola baru untuk memelihara suatu sistem sosial.<sup>20</sup>

Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural adalah masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari

---

<sup>18</sup> Scott Appelrouth, Laura Desfor Edles, *Classical and Contemporary Sociological Theory; Text and Readings*,, Page 347.

<sup>19</sup> Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogja, 1990), hlm 136.

<sup>20</sup> Talcot Parsons, *The Social System*, (London: Routledge 11 New Fetter Lane, 1991), Page 57.

para anggotanya mengenai nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut mempunyai kemampuan mengatasi berbagai perbedaan sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.<sup>21</sup>

Masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan memiliki saling ketergantungan dengan fungsi masing-masing. Teori fungsionalisme struktural mempunyai latar belakang kelahiran berupa mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial.<sup>22</sup>

Suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, parsons membagi fungsi menjadi 4 yang terkenal dengan konsep “AGIL” singkatan dari *Attention*, *Goal*, *Attainment*, *integration*, dan *Latency*. Agar dapat terus bertahan, setiap struktur harus menjalankan keempat skema tersebut. Adapun penjabaran dari skema AGIL dijelaskan dalam uraian berikut ini.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi (Dari Klasik Sampai Modern)*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2015), hlm 131.

<sup>22</sup> Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi (Dari Klasik Sampai Modern)*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2015), hlm 131.

<sup>23</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 117.

a) *Attention* (Adaptasi)

Sistem harus mampu mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Artinya, sistem harus mampu beradaptasi (menyesuaikan) dengan lingkungan beserta segala kebutuhannya.

a. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Pencapaian tujuan dalam konteks ini berarti setiap struktur harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.

b. *Integration* (Integrasi)

Struktur harus mengatur hubungan setiap bagian yang menjadi komponen secara terintegrasi.

c. *Latency* (Latensi)

Latensi bermakna setiap struktur harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya. Artinya, latensi dibutuhkan dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi.<sup>24</sup>

Teori ini relevan dengan penelitian ini, karena membahas tentang struktur-struktur dan fungsi-fungsi masyarakat desa. Apabila dikontekstualisasikan dalam pemanfaatan dana desa di Desa Sidoluhur, maka tidak terlepas dari struktur desa yaitu, pemerintah desa sebagai eksekutor dan masyarakat desa sebagai penerima. Keduanya, memiliki fungsi yang saling mempengaruhi

---

<sup>24</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Post Modern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm 406.



antara satu dengan yang lain. Pemerintahan desa harus saling sinergi dalam menyukseskan program-program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa.

Sukses dan tidaknya suatu pemerintahan desa itu tergantung fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu struktur. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus memiliki inisiatif dan inovasi yang baik demi terwujudnya pembangunan desa yang progresif. Selain itu, pemerintah harus menanamkan rasa optimisme dan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat desa akan simpatik dan dapat kooperatif terhadap program-program yang dilaksanakan pemerintah desa.

Salah satu pokok yang penting dalam teori ini adalah penerapan konsep AGIL dalam struktur desa. *Pertama, Attention.* Pemerintah desa perlu berdaptasi dengan masyarakat. Artinya, pemerintah desa harus memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat konstruktif bagi pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat. Selain pemerintah desa, masyarakat juga harus bisa berdaptasi, menjalankan ataupun mengelola program-program yang diberikan oleh pemerintah desa dengan sebaik-baiknya.

*Kedua, Goal Attainment.* Dalam konteks ini, pemerintah desa perlu memiliki rancangan kerja pendek, menengah dan panjang yang berpihak kepada kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Selain itu, sinergitas dari masyarakat sebagai penerima kebijakan sangat diperlukan untuk mewujudkan

pembangunan desa yang lebih baik. *Ketiga, Integration*. Pemerintah desa perlu merangkul semua elemen masyarakat desa dengan cara duduk bersama membahas pembangunan desa, sehingga diharapkan memunculkan kedekatan intens antara pemerintah dan masyarakat. *Keempat, Latency*. Penanaman kepercayaan terhadap kinerja pemerintah berupa transparansi dapat memunculkan sikap optimis dan kooperatif dari masyarakat.

## 2. Pembangunan

Pembangunan dianggap sangat identik dengan industrialisasi. Tujuan utamanya cukup jelas: untuk meningkatkan pendapatan dan dalam proses itu memberi orang miskin akses ke berbagai barang dan layanan kemudian tersebar luas di masyarakat maju. Singkatnya, masyarakat semakin kaya atau lebih makmur; dan kemakmuran diukur dalam angka dolar. Artinya, orientasi dari pembangunan adalah produktifitas meningkat.<sup>25</sup>

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (community development) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (rural development)

---

<sup>25</sup> John Rapley, *Understanding Development; Theory And Practice in Third World*, (Lynne Rienner Publisher: Boulder, USA, 2007), Page 1.

mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.<sup>26</sup>

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian jenis ini adalah deskriptif kualitatif. Pada umumnya, penelitian jenis ini dilakukan dalam bentuk studi kasus. Format penelitian jenis ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada

---

<sup>26</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal 237.

<sup>27</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah,,*,hal 242.

suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Berdasarkan ciri tersebut, memungkinkan studi ini dapat diamati mendalam. Selain itu, deskriptif kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang variabel sosial.<sup>28</sup>

## 2. Definisi Operasional

Menurut KBBI, Pemanfaatan adalah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan.<sup>29</sup> Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'Manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.<sup>30</sup>

Pada masa orde baru, desa mengalami stagnanisasi karena otonomi desa dibatasi oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa desa diposisikan berada di bawah kecamatan dan kedudukannya diseragamkan di seluruh Indonesia. Peraturan tersebut menghambat kemajuan masyarakat desa, karena

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2007), hlm 68-69.

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/manfaat> diakses pada hari Kamis, 27/06/2019 jam 9.33 WIB.

<sup>30</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html>. diakses pada hari Kamis, 27/06/2019 jam 9.33 WIB.

mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat istiadat desa.<sup>31</sup>

Pada era reformasi, diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut mengalami tiga kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sampai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.<sup>32</sup> Undang-Undang tersebut membahas tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat.

Undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa memuat kewenangan desa.<sup>33</sup> Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, yaitu mewujudkan otonomi desa agar desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 1

<sup>32</sup><https://www.bphn.go.id> pada hari Sabtu, 9/3/2019 jam 13.39.

<sup>33</sup><https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada hari Selasa 12/3/2019 jam 20.21.

<sup>34</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 1-2.

Prinsip otonomi desa menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya artinya desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri seluruh urusan pemerintahannya di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu, sebagai komitmen pemerintah dalam memandirikan pemerintah desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama Alokasi Dana Desa. Alokasi tersebut diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>35</sup>

Pada pasal ayat yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan;

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses pada hari Selasa 12/3/2019 jam 20.21.

<sup>36</sup> Azwardi Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), hlm 4.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>37</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.<sup>38</sup>

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>39</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan masyarakat adalah

---

<sup>37</sup> Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, *Kajian Dana Desa di Jawa Tengah*, (Jakarta; Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2018), hlm 6.

<sup>38</sup> Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, *Kajian Dana Desa di Jawa Tengah*,,,,hlm 6.

<sup>39</sup> Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 116.

percampuran antara pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

#### a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya.<sup>40</sup> Data primer dapat didapatkan dengan cara menggali langsung kepada informan. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam sesuai panduan wawancara tentang penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.<sup>41</sup> Data jenis ini berupa dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak subjek penelitian maupun pihak luar yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengambilan Data**

#### a) Observasi

Teknik pengumpulan data yang paling umum adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek riset, artinya pengamat atau peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang diamati.<sup>42</sup> Menurut Haris

---

<sup>40</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset; Sumber Daya Manusia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta: 2004), hlm 67.

<sup>41</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset; Sumber Daya Manusia...*, hlm 67.

<sup>42</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset; Sumber Daya Manusia...*, hlm 70.



Herdiansyah, observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>43</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung dan lebih mendalam terhadap fakta-fakta lapangan terkait dengan pemanfaatan dana desa yang ada di Desa Sidoluhur.

b) Wawancara Mendalam

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.<sup>44</sup> Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Ibu Pariyem)
2. Kepala Bidang Administrasi dan Umum

---

<sup>43</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm 143.

<sup>44</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm 20-21.

(Bapak Mindar)

3. Ketua BUMDES (Bapak Gunadi)
3. Tokoh Masyarakat (Bapak Nur)
4. Tokoh Agama (Bapak Suwito)
5. Tokoh Pemuda (Jari)
6. Warga (Ibu Siti, Ibu Pasri, Sukendro)
7. Guru TK (Ibu Eri)

c) Dokumentasi

Selain pengamatan langsung dan wawancara mendalam, teknik pengumpulan data yang tidak kalah penting adalah dokumentasi. Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>45</sup> Data ini cenderung kepada data sekunder. Peneliti akan mengumpulkan berbagai macam data dan fakta di lapangan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Dana yaitu, di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data yaitu; reduksi data, penyajian

---

<sup>45</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 202.

data dan penarikan kesimpulan.<sup>46</sup> Dalam analisis data ini, proses awalnya yaitu dengan pengumpulan data. Pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Artinya peneliti membuat singkatan dan menyeleksi data yang diperoleh di lapangan. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis disertai dengan tabel sebagai pendukung sajian data. Setelah pengumpulan data berakhir, tindakan peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan dirasa kurang mantap maka peneliti akan menggali *fieldnote* (catatan lapangan). Tetapi jika dalam *fieldnote* (catatan lapangan) belum diperoleh data yang diinginkan, maka peneliti mencari data di lapangan. Antara pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan hampir bersamaan dan terus menerus dengan memanfaatkan waktu yang tersisa.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

---

<sup>46</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode baru*, ( Jakarta, UI press, 1992), hlm 20.

BAB II : merupakan gambaran umum yang terdiri dari kondisi geografis, kependudukan, struktur pemerintah Desa Sidoluhur pada Tahun 2019.

BAB III : merupakan pembangunan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Dana Desa yang berisi pembangunan masyarakat Desa Sidoluhur sebelum adanya dana desa, pembangunan masyarakat desa sesudah adanya dana desa, program pemanfaatan dana desa untuk pembangunan masyarakat.

BAB IV : merupakan hubungan pemerintah desa dengan Unsur-unsur Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat melalui Dana Desa yang berisi model relasi antara Pemerintah Desa dengan Unsur-unsur masyarakat dalam Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa dan partisipasi dan Respon Masyarakat Desa Sidoluhur dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Masyarakat Melalui Dana Desa.

BAB V : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **DANA DESA DAN PEMBANGUNAN**

#### **A. Dana Desa**

##### **1. Konsep Dana Desa**

Terbitnya undang-undang tentang pemerintah desa pada tahun 2014 tentu memberikan dampak yang cukup positif. Hal ini dikabarkan kepada masyarakat mengenai dana desa yang begitu besar pertahunnya. Tentu kesempatan itu diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep dari dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat anggaran dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya ditransfer ke APB desa.<sup>47</sup> Dana desa juga merupakan dana pembangunan yang didesentralisasikan bagi desa sebagai proporsi tertentu dari APBD dan APBN yang ditujukan untuk pemerataan keuangan desa.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat 2.

<sup>48</sup>Antono Herry, Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa, Vol. V, No. 1 (Jurnal Ilmiah CIVIS, 2015), Hal 744

b) Definisi lain mengenai dana desa juga dimaknai sebagai pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran dan pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan.<sup>49</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Dana Desa

Mengacu kepada uu nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, maka masyarakat secara umum diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi dari dana desa:

a) Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 60 tahun 2014 tentang dana desa mengatur tujuan dana desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

---

<sup>49</sup>Abu Rahum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Vol. 3, No. 4, (*E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015), Hal 1625.

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.<sup>50</sup>

b) Berkenaan dengan fungsi dari dana desa itu sendiri adalah dilihat dari *principal*, yaitu dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antar desa dalam konteks desentralisasi dan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.<sup>51</sup> Selain itu dana desa juga bertujuan untuk menstimulasi pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatannya dengan melibatkan masyarakat.<sup>52</sup>

### 3. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>53</sup> Penggunaan Dana Desa dan Rencana kerja pemerintah desa. ADD

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bab V Pasal 19.

<sup>51</sup> Antono Herry, Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa, Vol. V, No. 1 (*Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2015), Hal 744.

<sup>52</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa, Vol. 13, No. 2, (*Jurnal Penelitian Politik*, 2016), Hal 197.

<sup>53</sup> Peraturan Presiden Nomor 40 BAB IV Pasal 19-21.

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa, seperti peningkatan pendapatan desa dan mengurangi jumlah penduduk miskin diantaranya dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan.<sup>54</sup>

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;

---

<sup>54</sup> Azwardi Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, (*Jurnal Ekonomi Pembangunan*), Juni 2014, Volume 12, No.1 Hal: 29 – 41.



pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan dan pemeliharaan embung desa; pembangunan energi baru dan terbarukan; pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

- c) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.

#### 4. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut<sup>55</sup>:

- a) Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDes yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- c) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan

---

<sup>55</sup> Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal 148.

pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah.

#### 5. Prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa

Prinsip pengalokasian yang dilakukan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b) Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
- d) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.<sup>56</sup>

#### 6. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pemerintah provinsi wajib mengoordinir pemberia dan penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, Hal 148.

- a) Pengawasan terhadap alokasi dana desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan alokasi dana desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.
- c) Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa, yaitu pengetahuan, partisipasi, dan pertanggungjawaban.<sup>57</sup>

## **B. Pembangunan**

### **1. Konsep Pembangunan**

Pembahasan mengenai pembangunan tentu cukup luas. Pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan, dan yang mengintegritaskan pertimbangan-pertimbangan ini dalam kebijakan-kebijakan actual.<sup>58</sup>

Namun berbicara mengenai pembangunan masyarakat desa tentu sedikit berbeda karena orientasinya langsung ke masyarakat. Hal ini didefinisikan sebagai perbaikan setiap

---

<sup>57</sup>Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal 150.

<sup>58</sup>Zulkhair Burhan, Efektivitas Bantuan Pembangunan International Dalam Program Sulawesi Agfor (Agroforestry Dan Forestry) Project Terhadap Pemberdayaan Hutan Desa Campaga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Vol. 1, No. 3, (Jurnal Wanua, 2016), Hal 67

bentuk usaha-usaha setempat yang bias dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama.<sup>59</sup> Oleh sebab itu, tentunya pemerintah desa sebagai penyelenggara desa memiliki kewenanga terkait pembangunan, yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>60</sup>

Pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki dapat dijadikan sebagai icon bagi desa tersebut. Oleh karena itu, pembangunan potensi unggulan yang dimiliki oleh suatu desa dapat berbeda dengan desa yang lain.<sup>61</sup> pembangunan masyarakat pedesaan juga merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dimana prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi:

---

<sup>59</sup>Darmini Roza Dan Arliman, Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa, Vol. 4, No. 3, (Jurnal Ilmu Hukum, Padjajaran, 2017), Hal 615

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Bab IV Pasal 18.

<sup>61</sup>Irma, Andi Dan Rahmawati, Pembangunan Desa Berbasis Potensi Local Agrowisata Di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia Political Science Review 2 (1), (Politik Indonesia, Brawijaya, 2017), Hal 48

transparans, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas, dan berkelanjutan.<sup>62</sup>

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.<sup>63</sup> Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Pembangunan perdesaan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota masyarakat perdesaan secara keseluruhan. Pembangunan perdesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat perdesaan secara holistic komprehensif meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.<sup>64</sup>

Pembangunan masyarakat desa juga diartikan sebagai community development mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat,

---

<sup>62</sup>Muhammad Badri, *Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)*, Vol. 27, No. 2, (*Jurnal Risalah*, 2016), Hal 62-63.

<sup>63</sup>Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal 3.

<sup>64</sup>Damsar Dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal 212

organisasi kemasyarakatan. Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan satu kebulatan yang terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Pembangunan perdesaan juga mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional.<sup>65</sup>

## 2. Tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.<sup>66</sup>

Selain itu, tujuan dari pembangunan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan

---

<sup>65</sup> Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal 234.

<sup>66</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, hal 243.

prakarsa masyarakat. pembangunan masyarakat desa harus terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.<sup>67</sup>

Sesuai dengan uu no 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### 3. Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dan sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincoln Arsyad (2001), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat digolongkan atas tiga jenis yaitu<sup>68</sup>:

---

<sup>67</sup> Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal 234.

<sup>68</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (jakarta: rajagrafindo persada, 2016), hal 26

a) Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Rencana jangka panjang biasanya disebut sebagai perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan panjang jauh ke depan tentang kerangka pemabangunan. Sedangkan aspek yang dibahas meliputi, bidang ekonomi, sosial budaya, dan tata ruang.

b) Perencanaan jangka menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan atau kepala daerah. Perencanaan jangka menengah berisi perumusan kerangka ekonomi makro, strategi kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden dan kepala daerah terpilih. Di samping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.

c) Perencanaan jangka pendek

Perencanaan jangka pendek perencanaan jangka pendek mencakup waktu hanya setahun, sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini



bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya, bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan.

#### 4. Strategi pembangunan daerah

Strategi pembangunan daerah pada dasarnya adalah merupakan cara atau jalan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Karena itu strategi yang baik dan tepat akan dapat menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien.<sup>69</sup>

Strategi pembangunan daerah sebaiknya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan, baik yang sudah dapat dilaksanakan, maupun belum. Strategi pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk memadukan berbagai kegiatan pembangunan seperti memajukan pertanian sekaligus industri perdesaan dengan mendorong partisipasi warga serta interkoneksinya dengan dukungan pengembangan wilayah perkotaan untuk pembangunan perdesaan.

#### 5. Partisipasi dalam pembangunan perdesaan

Partisipasi pada suatu aktivitas public di perdesaan dilihat sebagai sesuatu yang bermanfaat. Konsep sesuatu yang bermanfaat bersifat relative, berbeda menurut orang dan

---

<sup>69</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era otonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal 30.

kelompok orang yang memiliki konteks sejarah sosial, budaya dan politik masing-masing. Ada tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

*Pertama*, partisipasi masyarakat dilihat sebagai suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih memercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengerahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, munculnya anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.<sup>70</sup>

#### 6. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, anatar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi

---

<sup>70</sup>Damsar dan indrayani, pengantar sosiologi perdesaan, (Jakarta: kencana, 2016), hal 240.

justru memperkuat posisi tawar dan percepatan pembangunan didesa yang bersangkutan. Manajemen pembangunan daerah ditingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah disegala bidang baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang terkait langsung dengan APBD, rencana jangka menengah (5 tahun) dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah (Properda), dan rencana jangka panjang (10-25 tahun) dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).<sup>71</sup>

Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa kedepan yang berbeda dalam koordinasinya, sehingga apa pun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah, aspiratif serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJMDes yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah/kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT, RW/ dusun dan desa.

---

<sup>71</sup> Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,,*Hal 133

Rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran pelaksanaan dalam mekanisme sebagai berikut<sup>72</sup>:

- a) Ditingkat masyarakat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT, RW/ dusun.
- b) Ditingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang akan dibiayai APBDesa dan atau APBD melalui forum Musbangdes.
- c) Ditingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarahdesa dan akan dibiayai APBD melalui forum Musrenbang.
- d) Diprioritas susulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada di tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut di antaranya, pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, hal 269.

<sup>73</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, hal 269.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis

Gambar 3.1



**Sumber:** Google Maps

Desa Sidoluhur merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Secara geografis, Desa Sidoluhur diklasifikasikan sebagai daerah dataran yang memiliki luas wilayah keseluruhan 229, 4 Ha (Hektare) yang meliputi, lahan persawahan 120 Ha, lahan tegal/ perkebunan 55, 4 Ha, Pekarangan/ perumahan 54, 2 Ha dan sisanya untuk lahan sungai, lahan jalan, dan lahan pemakaman umum. Adapun batas-batas wilayah Desa Sidoluhur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberagung, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Sedangkan untuk dukuh, Desa Sidoluhur terbagi menjadi dua dukuh yaitu, Dukuh Barisan dan Dukuh Guyangan. Dari kedua dukuh tersebut, terdapat 4 RW (Rukun Warga) dan 17 RT (Rukun Tetangga).<sup>74</sup>

Desa sidoluhur merupakan desa perbatasan antara Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang. Hal ini bisa dilihat di sebelah timur terdapat sungai yang membentang panjang dan luas yang mengitari Desa Sidoluhur. Masyarakat biasanya menggunakan jembatan untuk menyeberangi sungai. Sebelumnya jembatan tersebut terbuat dari bambu, namun setelah adanya dana desa jembatan tersebut dibangun dengan menggunakan semen. Dengan harapan, jembatan tersebut semakin kuat dan tidak mudah terseret arus sungai, sehingga memudahkan penyeberangan masyarakat baik masyarakat Desa Jatihadi maupun Masyarakat Sidoluhur.

---

<sup>74</sup> Data Geografis dan Monografis Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

## B. Kondisi Demografi

### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Desa Sidoluhur pada Tahun 2018, Jumlah penduduk Desa Sidoluhur pada Tahun 2018 berjumlah 2176 jiwa dari segala umur. Adapun jumlah penduduk Laki-laki 1081 jiwa, jumlah Penduduk Perempuan 1095 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2019, berjumlah 2.348 jiwa untuk segala umur. Adapun jumlah Penduduk Laki-laki berjumlah 1.188 jiwa, sedangkan Penduduk Perempuan berjumlah 1.160 jiwa.<sup>75</sup>

**Tabel 3.1**

**Jumlah Penduduk Desa Sidoluhur Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-laki	1.188
2.	Perempuan	1.160
Total		2.348

Sumber: <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

### 2. Masyarakat Berdasarkan Agama

Desa Sidoluhur terdapat 742 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, secara keseluruhan penduduk Desa Sidoluhur

---

<sup>75</sup> <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/> diakses pada hari Senin, 8/4/2019, jam 00.00 WIB.



memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, Desa Sidoluhur hanya memiliki fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan agama Islam seperti masjid, mushola, pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Adapun data konkret fasilitas-fasilitas tersebut dimuat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Fasilitas Keagamaan Desa Sidoluhur**

<b>NO</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	2
2	Mushola	20
3	Pesantren	1
4	TPQ (Taman Pendidikan Qur'ani)	2
Total		25

Sumber:

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas agama yang paling banyak dibangun di Desa Sidoluhur adalah mushola. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat bahwa apabila hanya mengandalkan masjid sebagai sarana sholat jamaah, maka tidak akan efektif untuk melaksanakannya, mengingat jumlah penduduk Desa Sidoluhur yang berjumlah 2176 jiwa. Selain itu, tidak hanya berkaitan dengan kapasitas masjid, namun juga berkaitan dengan jamaah yang letaknya jauh dengan masjid.

Apabila masyarakat yang letaknya jauh tersebut menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka orang-orang akan mengalami kecapekan yang karena harus bolak-balik masjid demi melaksanakan sholat jamaah. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Sidoluhur memiliki inisiatif membuat mushola di setiap RT. Pada setiap RT, biasanya ada yang membuat 1-3 mushola tergantung kebutuhan RT masing-masing untuk mengefisiensi jarak tempuh. Sedangkan untuk masjid, terdapat 2 masjid yaitu, 1 di Dukuh Barisan dan 1 di Dukuh Sidoluhur.

Di samping itu, Desa Sidoluhur juga memiliki pesantren salaf yang terletak di Dukuh Guyangan. Pesantren tersebut didirikan oleh kyai yang berasal dari Desa Kemiri. Biasanya masyarakat mengenal kyai tersebut dengan panggilan Mbah So. Menurut mbah So, pesantren tersebut didirikan dengan tujuan untuk menangkal budaya-budaya yang tidak baik masuk ke dalam pribadi pemuda Desa Sidoluhur. Santri-santri Mbah So tidak hanya berasal dari Desa Sidoluhur, akan tetapi juga berasal dari berbagai Desa di Kecamatan Jaken. Seperti pesantren pada umumnya, pesantren ini juga mengajarkan kitab kuning dan pelajaran agama lainnya. Mbah So menyampaikan:

“ Pesantren ini saya dirikan untuk mencegah budaya-budaya luar yang kurang baik masuk ke dalam diri pemuda. Oleh sebab itu, hadirnya pesantren ini diharapkan ke depannya mampu memberikan manfaat bagi pemuda sehingga pemuda-pemuda yang mengaji di pesantren ini dapat menjadi pribadi sholih. Sementara ini,

pesantren ini untuk laki-laki saja, tapi saya punya target ke depannya juga ada pesantren khusus perempuan. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat agar memondokkan anak-anaknya di sini agar nantinya anak-anaknya memiliki kemampuan agama yang baik sehingga bisa menjadi bekal di masyarakat nanti. Selain itu, saya tidak mengajarkan kitab kuning dan pelajaran agama saja, akan tetapi saya juga membekali mereka dengan ilmu silat nusantara, sehingga ketika dalam keadaan terdesak mereka bisa membela dan mempertahankan diri mereka”<sup>76</sup>.

Di sisi lain, Desa Sidoluhur juga memiliki TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran) yang terdapat masing-masing 1 di Dukuh Guyangan dan juga Dukuh Barisan. Tujuan didirikannya TPQ ini adalah agar anak-anak SD kelas 1-6 dapat belajar Al-Quran dengan efektif dan berjenjang sesuai kemampuan anak. Menurut ibu Maskanah selaku pimpinan utama TPA di Dukuh Guyangan mengatakan bahwa TPA tidak hanya mengajarkan cara membaca Al-qur’an, akan tetapi TPA juga mengajarkan tentang pengetahuan agama seperti nahwu, shorof, praktek sholat dan pengetahuan agama Islam lainnya. Sedangkan untuk pengajar, TPA ini diajar oleh pengajar yang professional yang sudah memiliki sertifikat mengajar dari Persatuan Guru TPQ di Kabupaten Pati. Jadi, semua guru tersebut sudah mendapatkan training dan juga diuji oleh penguji yang professional. Ibu Maskanah menyampaikan:

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Mbah So selaku pendiri pesantren pada hari Selasa, 23 April 2019, jam 21.00 WIB.

“TPA Al-Hidayah didirikan tidak hanya mengajarkan baca tulis Al-Qur’an akan tetapi TPA ini juga mengajarkan bagaimana caranya sholat dan bagaimana caranya membaca kitab kuning dengan cara diajarkan nahwu shorof. Sedangkan untuk pengajar, semua pengajar di TPA ini memiliki sertifikat mengajar yang jelas dari persatuan guru TPQ di Kabupaten Pati. Pada waktu itu, kita dilatih dan diuji di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati”.<sup>77</sup>

### 3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi yang ada dalam setiap orang, sehingga diharapkan mereka memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan dalam mengarungi kerasnya kehidupan. Selain itu, pendidikan merupakan bekal setiap orang dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan di kehidupan mereka. Pendidikan dapat diraih dengan cara mengikuti pendidikan formal maupun non-formal.

Masyarakat Desa Sidoluhur, Apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya yang sudah mengimplementasikan wajib belajar 9 tahun yang merupakan kewajiban yang dirancang oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat tinjau dari data di bawah ini yang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Maskanah selaku kepala TPA Al-Hidayah Rabu, 24 April 2019, jam 20.00 WIB.

menunjukkan 50% lebih masyarakat Desa Sidoluhur sudah melaksanakan kewajiban belajar umur 9 tahun.

**Tabel 3.3**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sidoluhur Tahun 2019**

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Tidak Tamat SD	117	110	227
2	Penduduk Tamat SD	221	291	512
3	Penduduk Tamat SLTP	136	214	350
4	Penduduk Tamat SLTA	68	84	152
5	Penduduk Tamat Diploma	4	3	7
6	Penduduk Tamat S-1	11	12	23

Sumber: <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

Kebanyakan masyarakat Desa Sidoluhur yang tidak lulus pendidikan formal ataupun tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, maka mereka akan memutuskan untuk mengundi nasib/ merantau/ bekerja di negeri orang. Dalam konteks ini, masyarakat tersebut akan bekerja di kota-kota yang menurut mereka potensial dalam menghasilkan uang seperti, Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota-kota besar lainnya baik di Jawa maupun luar Jawa.. Kebanyakan dari mereka, bekerja ke dalam sektor bangunan. Biasanya pemborong di Desa Sidoluhur akan menyuruh mandornya mencari orang untuk bekerja sebagai

kuli proyek bangunan. Biasanya mereka akan ditempatkan di kota-kota besar baik di Jawa maupun di luar Jawa. Berbekal kemauan dan *skill* terbatas, masyarakat Desa Sidoluhur pergi ke kota untuk bekerja sebagai kuli proyek bangunan. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang pulang sukses dan menjadi kaya raya. Sebagian dari mereka menjadi sukses, karena mereka sabar dalam menekuni pekerjaan tersebut. Selain itu, mereka juga berfikir dan mencoba untuk mengembangkan kemampuan diri yang awalnya dari kuli menuju strata yang lebih tinggi yaitu, mandor ataupun pemborong. Sedangkan orang yang kuliah, biasanya adalah orang-orang yang tergolong dalam strata orang yang kaya. Biasanya mereka adalah anak PNS (Pegawai Negeri Sipil). Walaupun demikian, pada era ini banyak orang yang tergolong orang biasa dapat merasakan bangku kuliah. Hal itu disebabkan tekad yang kuat dari orang tersebut. Dengan modal nekat, golongan ini pergi kuliah sambil mencari kerjaan sampingan/ *part time*. Bapak Mindar menyampaikan:

“Banyak orang di Desa Sidoluhur yang tidak lulus ataupun tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh minimnya biaya. Oleh sebab itu, banyak dari mereka yang merantau ke kota untuk bekerja. Biasanya bekerja di sektor informal seperti karyawan, buruh pabrik ataupun buruh bangunan. Namun kebanyakan masyarakat Desa Sidoluhur itu merantau untuk menjadi buruh bangunan. Biasanya ada pemborong dari desa ini yang menyuruh mandornya untuk mencari orang yang mau diajak bekerja sebagai kuli. Walaupun hanya menjadi kuli, terkadang banyak dari mereka yang sukses dan menjadi

kaya raya. Hal ini sebabkan mereka mau berfikir dan mau mengembangkan diri mereka untuk menjadi mandor ataupun menjadi pemborong. Sedangkan berkaitan dengan orang dapat kuliah, biasanya mereka berasal dari keluarga yang mampu. Mereka biasanya bekerja dalam sektor yang produktif seperti PNS, pemborong ataupun pengusaha.<sup>78</sup>

Sedangkan untuk fasilitas pendidikan atau sekolah, Desa Sidoluhur memiliki fasilitas jenjang pendidikan atau pengajaran dari mulai PAUD, TK, SD sampai SMP. Sedangkan untuk SMA, Desa Sidoluhur belum memilikinya, sehingga banyak masyarakat yang melanjutkan SMA ke desa yang memiliki fasilitas jenjang pendidikan tersebut.

**Tabel 3.4**  
**Fasilitas Jenjang Pendidikan di Desa Sidoluhur**

No	Fasilitas Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Paud	2
2	TK	2
3	SD	2
4	SMP	1

sumber: <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Mindar selaku Kepala Keuangan dan Administrasi, Selasa, 23 April 2019, Jam 20.00 WIB.

#### 4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Corak utama perekonomian masyarakat Desa Sidoluhur adalah pertanian. Mayoritas atau sebagian besar masyarakat Desa Sidoluhur berprofesi sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari lahan pertanian/ persawahan di Desa Sidoluhur yang memiliki luas paling besar daripada lahan lain yaitu, 120 Ha dari proyeksi luas wilayah keseluruhan 229, 4 Ha.<sup>79</sup> Pertanian di Desa Sidoluhur masih mengandalkan curah hujan, sehingga hasil panen tidak dapat diprediksi. Terkadang masyarakat mampu melakukan panen raya sampai 2 kali dan terkadang hanya 1 kali. Pertanian di Desa Sidoluhur sudah cukup modern misalnya, dalam hal membajak sawah yang sudah tidak menggunakan sapi, akan tetapi sudah menggunakan traktor. Sedangkan untuk hasil utama pertanian di Desa Sidoluhur adalah padi. Akan tetapi, di musim-musim tertentu masyarakat juga sering menanam hasil pertanian lain seperti, jagung, umbi-umbian dan kacang.

Padi sebagai hasil utama pertanian di Desa Sidoluhur sangat membantu perekonomian masyarakat desa. Padi dijadikan komoditas utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya padi tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian yang lain dijual untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Masyarakat menjual padi ke tengkulak dan menggunakan hasil jualan tersebut untuk kebutuhan sehari-

---

<sup>79</sup> Data Geografis dan Monografis Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.



hari seperti, belanja kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan anak dan lain sebagainya.

Kebutuhan yang banyak tersebut membuat ekonomi masyarakat menjadi lemah. Oleh sebab itu, tidak jarang masyarakat banyak mencari pekerjaan sampingan seperti buruh petani atau sering dikenal *mocok* dalam istilah jawa untuk menambah penghasilan mereka. Selain itu, bidang lain yang menjadi pilihan adalah guru, pedagang, perantauan dan lain sebagainya.

Dalam konteks perdagangan, masyarakat sering menggunakan hasil pertanian untuk membuat makanan misal, kerupuk yang bahan dasarnya ketela atau yang sering disebut *kempling* dalam istilah jawa. Kerupuk tersebut dijual di pasar terdekat. Namun terdapat kendala yang membuat usaha-usaha tersebut menjadi berjalan tidak efektif seperti, lemahnya SDM, ketatnya persaingan, dan pemasaran yang sempit. Oleh sebab itu, usaha-usaha tersebut hanya menjadi usaha mikro yang hasilnya minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## 5. Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Sidoluhur memiliki sosial-budaya yang erat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Desa Sidoluhur dalam menjaga tradisi dan budaya nenek moyang. Dalam konteks ini, masyarakat masih melestarikan budaya-budaya peninggalan orang terdahulu yang menjadi ciri khas sebuah desa. Saat ini budaya yang masih dilestarikan adalah

sedekah bumi. Budaya ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah S.W.T karena telah memberikan hasil panen yang melimpah kepada masyarakat Desa Sidoluhur. Tradisi ini adalah tradisi rutin yang diikuti dan dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah musim panen oleh seluruh masyarakat Desa Sidoluhur. Sedekah bumi ini biasanya dilakukan dengan cara membagikan makanan kepada saudara dan kerabat-kerabat dekat serta masyarakat yang membutuhkan.

Awal dari acara ini adalah makanan atau berkat (istilah masyarakat setempat) dibawa ke suatu tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat yang sering disebut dengan nama *punden*.<sup>80</sup> Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian tari *Tayub*.<sup>81</sup> Kesenian ini merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar karena apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat percaya akan terjadi musibah kematian hingga musibah *paceklik*<sup>82</sup> hasil bumi. Selain kesenian tari, masyarakat juga mengadakan acara keagamaan seperti pengajian tahlil, dan istigosah. Di samping itu, masyarakat juga mengadakan agenda olahraga sepakbola.

---

<sup>80</sup> Punden di Desa Sidoluhur berupa petilasan telaga yang dipercayai sebagai bekas langkah kaki dari orang belanda. Saat ini telaga tersebut tidak ada airnya, melainkan hanya ada pohon-pohon asem yang sangat besar di tempat tersebut.

<sup>81</sup> Tayub merupakan salah satu kesenian Jawa yang berupa seni tari yang diiringi dengan alat musik gamelan.

<sup>82</sup> Paceklik adalah kegagalan panen.

### C. Struktur Sidoluhur Tahun 2019

Desa Sidoluhur digolongkan sebagai desa swadaya. Artinya, Desa Sidoluhur merupakan desa yang tertinggal dan terbelakang dari banyak aspek termasuk organisasi. Oleh sebab itu, organisasi formal dan informal masih banyak yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks struktur organisasi perangkat desa, Desa Sidoluhur hanya memiliki 2 struktur organisasi yaitu, pemerintah desa dan BPD. Sedangkan LPMD (lembaga Pemberdayaan Desa) masih belum dibuat strukturnya, karena terkendala sumber daya yang enggan untuk mengisi lembaga tersebut. Masyarakat menganggap bahwa lembaga tersebut tidak dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi diri mereka.<sup>83</sup> Berikut struktur organisasi perangkat desa yang ada di Desa Sidoluhur.

#### 1. Struktur Pemerintahan Desa Sidoluhur 2019

Kepala Desa	: Pariyem
Sekretaris	: -
Kepala Seksi	
- Pemerintahan	: -
- Pembangunan	: Kartamat
- Kesra	: Suwanto

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kepala Keuangan dan Administrasi, Bapak Mindar, Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.

### Kepala Urusan

- Kaur Umum&Administrasi : Sumindar
- Kaur Keuangan : Semi

### Kepala Dusun

- Kepala Dusun Guyangan : Samiun
- Kepala Dusun Barisan : Yoni

### Kepala RW dan RT

- Ketua RW 1 : Samin
  - 1. Ketua RT 1 : Sunari
  - 2. Ketua RT 2 : Supriyanto
  - 3. Ketua RT 3 : Sukarman
  - 4. Ketua RT 4 : Mutardi
  - 5. Ketua RT 5 : Sunarto
- Ketua RW 2 : Rukemi
  - 1. Ketua RT 1 : Jayadi
  - 2. Ketua RT 2 : Parwi
  - 3. Ketua RT 3 : Yasir
  - 4. Ketua RT 4 : Kambari
- Ketua RW 3 : Rukiban
  - 1. Ketua RT 1 : Sugiyanto
  - 2. Ketua RT 2 : Kamatsaeri
  - 3. Ketua RT 3 : Suji
  - 4. Ketua RT 4 : Ramijan

- Ketua RW 4 : Jaki
- 1. Ketua RT 1 : Judianto
- 2. Ketua RT 2 : Karman
- 3. Ketua RT 3 : Darso
- 4. Ketua RT 4 : Darmo

## 2. Struktur Personalia Badan Permusyawaratan Rakyat

- Ketua : Sutardi S.Pd.
- Wakil Ketua : Sugiyanto
- Sekretaris : Suntoyo
- Bendahara : Siti Maskanah
- Anggota : Nur Sholikin
- Anggota : Purnomo
- Anggota : Lastari
- Anggota : Jarmi
- Anggota : Supriyanto

### 3. Tugas dan Wewenang Perangkat Desa

Setiap organisasi pasti memiliki struktur dan peran yang berbeda-beda yang ditentukan melalui peraturan desa. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Dalam konteks ini, berikut tugas dan wewenang perangkat Desa Sidoluhur berdasarkan Peraturan Desa Sidoluhur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:

#### a) Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Sidoluhur Nomor 5 Pasal 7 ayat 1, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk wewenang, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  11. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  12. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  13. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Sekretaris Desa
- Sekretaris Desa mempunyai tugas :
1. Menyusun program kerja tahunan Desa;

2. Melaksanakan pembinaan dan administrasi/ ketatausahaan Pemerintah Desa;
3. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
4. Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
5. Mengoordinasikan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c) Kepala Administrasi dan Umum

Tugas Kepala Urusan Administrasi dan Umum, yaitu :

1. Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi dan umum;
2. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
3. Melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
4. Mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;



5. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan-laporan Kepala Desa; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

d) Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan belanja Desa;
2. Mengoordinasikan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
3. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
5. Melaksanakan evaluasi keuangan Pemerintah Desa.

e) Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
2. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

4. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
5. Membantu melaksanakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum;
6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f) Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
2. Melaksanakan pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa;
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam

meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan;
6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang keagamaan, kematian, pernikahan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat dan pelayanan lainnya dalam rangka kesejahteraan rakyat;
3. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bencana alam;
4. Membantu melaksanakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
5. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;

6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

h) Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas :

1. Menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

i) Tugas dan Wewenang BPD

Tugas dan wewenang BPD adalah :

1. Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa;
2. Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;

3. Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
4. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
5. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
7. Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
8. Melaporkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;
9. Menerima laporan nama calon Kepala Desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati;
10. Mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;
11. Bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan Kepala Desa;
12. Menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah Desa bersama Pemerintah Desa dan

unsur masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Membahas pengelolaan kekayaan milik Desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;
14. Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dari masyarakat Desa;
15. Memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
16. Mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati; dan
17. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DANA DESA**

#### **A. Pemanfaatan Dana Desa**

Pemerintah desa dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>84</sup> Tentunya hal ini tidak terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa. Namun pemerintah desa harus lebih bijaksana dalam mengelola seluruh aspek yang dijalankan mengingat dana yang dialokasikan cukup besar.

Berdasarkan hal itu tentu banyak hal-hal yang mesti diselaraskan sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan dari pemerintah desa itu sendiri. Artinya meskipun terjadi perbedaan antara pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah harus memprioritaskan kearifan lokal dimana pemerintah mengimplementasikan programnya.

Tentunya setiap program pemerintah desa memiliki pedoman sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014, yang sudah ditetapkan dana pertahunnya. Hal ini didukung melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidoluhur, Ibu Pariyem. Beliau menyampaikan bahwa Dana Desa untuk Desa Sidoluhur sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Walaupun sudah ditetapkan, namun Pemerintah Desa tidak dapat mencairkan seluruh dana tersebut. Pemerintah Desa

---

<sup>84</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1.

harus mencairkan dana tersebut sesuai dengan program pembangunan ataupun pemberdayaan. Berkaitan dengan pencairan dana desa, pihak Pemerintahan Desa harus membuat RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dalam bentuk proposal. Kemudian diserahkan ke Pemerintah daerah dan menunggu pencairan kira-kira 1 bulan. Dalam wawancara, Ibu Pariyem menyampaikan:

“Dana desa untuk Desa Sidoluhur sudah ditentukan jumlahnya oleh pemerintah daerah. Tapi untuk pencairan kita tidak bisa mencairkan secara keseluruhan dana tersebut. Semua harus bertahap. Harus melalui proposal RAB (Rancangan Anggaran Belanja). Kemudian diserahkan ke kabupaten dan selanjutnya kita nunggu kira-kira 1 bulanan”.<sup>85</sup>

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa terkait penggunaan dana desa adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa

Pada konteks ini, Pemerintah Desa Sidoluhur melakukan pembenahan terhadap pelayanan pemerintahan diantaranya, pendataan profil desa secara rinci dan berkala, pendataan batas-batas desa secara rinci, penataan administrasi desa secara rapi dan digitalisasi, penerapan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur pada Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.

<sup>86</sup> Peraturan pemerintah 60 tahun 2014 tentang dana desa bab v pasal 19.



teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan aparatur desa, dan pengadaan sarana penyelenggaraan desa (komputer 2, proyektor 1, printer 2 dan software).<sup>87</sup> Beliau menyampaikan bahwa apabila pembangunan pelayanan dan fisik desa sudah dilakukan, maka secara otomatis hal ini dapat menjadi sarana pendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoluhur. Beliau menyampaikan:

“kita sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. kita sudah bekerja sekuat tenaga. Kita sudah membangun pelayanan yang lebih baik. Sekarang kita sudah menggunakan komputer dan internet dalam segala hal agar pelayanan kepada masyarakat semakin lebih efektif. Selain itu, pembangunan infrastruktur desa sudah kita perbaiki seperti pengaspalan jalan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan rabat beton, pembangunan BUMDES, pembangunan gedung PAUD, pembangunan rumah Punden, pengadaan mobil desa, pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) dan lain sebagainya. Selain itu, wujud program kami untuk pembinaan masyarakat yaitu PMT (Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita)”<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Dokumen RPJM Desa Sidoluhur

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Mindar selaku Kepala Administrasi dan Umum pada hari Selasa, 23 April 2019, Jam 20.00 WIB.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa

Selain itu, dalam bidang pembangunan sudah banyak yang direalisasikan seperti, pengaspalan jalan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan BUMDES, pembangunan gedung PAUD, pembangunan rumah Punden, pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) dan lain sebagainya. Dalam hal ini, lembaga kemasyarakatan di Desa Sidoluhur belum berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga ini sebenarnya adalah ujung tombak pemberdayaan masyarakat Desa Sidoluhur. Akan tetapi, pada kenyataannya lembaga ini tidak aktif, karena kekurangan sumber daya yang bersedia menjadi pengurusnya. Hal ini bisa dilihat pada struktur keorganisasian lembaga kemasyarakatan ini yang hanya terdiri dari 3 orang, yaitu 1 ketua dan 2 anggota. Dalam wawancara, Bapak Mindar menyampaikan:

“Lembaga Kemasyarakatan atau sekarang disebut LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) tidak aktif. Karena lembaga tersebut kekurangan sumber daya. Jarang yang mau mengisi lembaga ini. Sejauh ini hanya ada 3 orang yang bersedia mengisi lembaga ini. Lembaga ini diketuai oleh bapak Jaenuri dan anggota pak Wariman dan pak Yasrin. Sejauh ini program-program mereka juga belum terlihat karena mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang jadi petani ada juga menjadi

punya warung. Itulah alasan mengapa lembaga ini tidak terlalu aktif”.<sup>89</sup>

3. Bidang pembinaan masyarakat,

pemerintah desa memberikan makanan tambahan kepada balita (PMT). Menurut Bapak Mindar, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Desa Sidoluhur dalam meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat yaitu, mempekerjakan masyarakat untuk membangun infrastruktur desa. Dalam konteks ini, masyarakat dibayar sesuai dengan *standard* upah minimum para buruh bangunan. Mereka biasanya dibayar 80-90 ribu rupiah sesuai tingkat kesulitan dan bidang pembangunan yang sedang dikerjakan. Selain itu, mengambil masyarakat asli Desa Sidoluhur untuk mengelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menekan jumlah pengangguran di Desa Sidoluhur.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan modal kepada masyarakat yang membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya. Biasanya yang meminjam modal ini adalah ukm-ukm kecil seperti, penjual kerupuk, penjual

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Mindar selaku kepala Administrasi dan Umum pada hari Selasa, 23 April 2019, Jam 20.00 WIB.

nasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pemerintah Desa Sidoluhur juga memberikan tunjangan kepada guru PAUD, guru TPQ dan kader posyandu serta melengkapi fasilitas-fasilitas posyandu. Ibu Pariyem menyampaikan:

“Beberapa langkah sudah dilakukan untuk melakukan pemerataan pendapatan, memberikan kesempatan dan berusaha bagi masyarakat Desa Sidoluhur. Diantaranya, menjadikan masyarakat Desa Sidoluhur sebagai pekerja dalam pembangunan desa, dengan bayaran yang pantas dan sesuai dengan standar minimal gaji buruh bangunan. Biasanya gaji yang diberikan sekitar 80-90 ribu rupiah tergantung bidang dan tingkat kesulitan bidang bangunan yang dikerjakan atau dibuat. Selain itu, kami juga sudah membangun kantor BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang mana nanti kantor tersebut akan diisi atau dikelola oleh orang asli desa ini. ini upaya untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, peminjaman modal bagi masyarakat yang dikelola bumdes juga sudah berjalan baik, dan terbukti sangat membantu masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Desa Sidoluhur juga memberikan tunjangan kepada guru PAUD, guru TPQ dan kader posyandu serta melengkapi fasilitas-fasilitas posyandu.”<sup>90</sup>

#### 4. Meningkatkan gotong royong masyarakat desa.

Tentunya, Pemerintah Desa telah melaksanakan program-program untuk meningkatkan gotong royong antar masyarakat. Semua program dilakukan dengan gotong

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur pada Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.

royong, bahkan sebelum melaksanakan ada yang namanya MUSDES (musyawarah desa). Di dalam MUSDES tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengusulkan program yang prospektif baik yang bersifat infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, tampaknya pengetahuan yang rendah dan kurangnya budaya kritis dalam diri masyarakat Desa Sidoluhur membuat kesempatan tersebut dengan sia-sia.

Menurut Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur, menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada masyarakat Desa Sidoluhur untuk mengemukakan pendapat dan mengusulkan program baik itu sifatnya pembangunan fisik desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Setelah tahap perencanaan yang dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat Desa Sidoluhur, kemudian tahap berikutnya yaitu, tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, semua elemen masyarakat diterjunkan dalam membangun infrastruktur Desa Sidoluhur, artinya saling bahu membahu satu dengan yang lain dalam menyelesaikan proyek infrastruktur desa. Di kesempatan yang lain, Pemerintah Desa Sidoluhur juga melakukan program kerja bakti atau lebih dikenal dalam istilah setempat “Ranjen” yang dilakukan ketika ada acara-acara besar

seperti sebelum ramadhan dan Idul Fitri, Idul Adha, Sedekah Bumi dan lain sebagainya. Ibu Pariyem menyampaikan:

“Pemerintah desa telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan semangat masyarakat Desa Sidoluhur dalam gotong royong. Salah satunya dalam bidang pembangunan. Kami mengundang dan mengajak masyarakat Desa Sidoluhur untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan agar masyarakat dapat memberi kritikan ataupun masukan terkait program pembangunan yang diinginkan masyarakat Desa Sidoluhur. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih belum bisa aktif karena mungkin keterbatasan pengetahuan mereka. Selain itu, tidak hanya dalam tahap perencanaan pembangunan, akan tetapi masyarakat juga diajak dan ikut berpartisipasi aktif dalam membangun langsung infrastruktur desa. Upaya lain yang kami lakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan kerja bakti atau ranjen pada waktu momen-momen besar, seperti sebelum ramadhan dan Idul Fitri, Idul Adha, sedekah bumi dan lain sebagainya.”<sup>91</sup>

Berdasarkan empat rangkaian di atas, tentu semuanya memiliki hubungan yang erat dalam pembangunan desa. Oleh sebab itu, kembali kepada acuan peneliti dalam teori AGIL akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi adaptasi

Dilihat dari sisi adaptasi, hubungan dari berbagai program tersebut sudah mulai baik. artinya adaptasi dari

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur pada Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 W

program-program desa sidoluhur terkait empat aspek tersebut terlihat jelas bagus dan mesti dipertahankan. Akan tetapi hanya ada satu sisi yang tampaknya perlu ditingkatkan, yaitu peningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan. Dalam hal ini LPMD.

Dalam konteks ini, fungsi Adaptasi pemerintah Desa Sidoluhur dalam memberikan ataupun merealisasikan program sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya, program pembangunan yang dapat dirasakan dalam mendukung pemberdayaan keagamaan masyarakat. Selain itu, pemerintah Desa Sidoluhur juga memiliki upaya untuk menampung aspirasi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari pemerintah Desa Sidoluhur melibatkan masyarakat dalam MUSDES.

## 2. Fungsi *Goal attainment*

Fungsi *goal attainment* pemerintah Desa Sidoluhur juga sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh salah satu tokoh masyarakat, Bapak Nur. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika pembangunan infrastruktur yang mana masyarakat menjadi pelaku dan sekaligus objek pembangunan serta mendapatkan upah atas pembangunan yang mereka lakukan. Selain itu, pemerintah juga aktif mengajak masyarakat untuk bermusyawarah. Ketika

MUSDES, masyarakat dilibatkan dan disuruh untuk memberi kritik dan masukan kepada pemerintah desa merupakan bentuk pemberdayaan yang dapat mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi, mungkin aspek peningkatan ekonomi masyarakat masih kurang. Menurutnya, harapan ke depannya masyarakat mendapatkan ruang ataupun kesempatan meningkatkan ekonomi lebih banyak. Dalam wawancara, Bapak Nur menyampaikan:

“Pembangunan jalan dan sebagainya itu dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. 80-90 ribu kan lumayan kalau proyeknya satu bulan udah berapa? Udah 2 jutaan lebih ya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan bisa memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga sering melibatkan masyarakat dalam musyawarah. Hal itu bisa dari MUSDES yang mana masyarakat diajak rembuk bareng untuk memberikan kritik ataupun saran kepada pemerintah desa”.<sup>92</sup>

### 3. Fungsi Integrasi

Teori ini mengarahkan kepada pemerintah untuk terus menjaga kebersamaan dengan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari proses pembangunan, baik dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dalam konteks ini, pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam tahap-tahap

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Nur selaku tokoh masyarakat pada hari Sabtu, 27 April 2019, Jam 20.00 WIB.



tersebut. Hal ini juga diperkuat melalui hasil wawancara kepada tokoh pemuda:

“Masyarakat Desa Sidoluhur saya rasa selalu aktif dalam semua kegiatan pembangunan ataupun yang lainnya. Masyarakat selalu menyempatkan waktu untuk datang dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Desa Sidoluhur. Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, saya rasa masyarakat juga begitu aktif. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menyampaikan ide-ide terkait dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, tidak hanya dalam proses perencanaan ataupun penyusunan program akan tetapi masyarakat juga aktif dalam hal pelaksanaan. Mereka saling gotong-royong dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Saya rasa ini adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk menyukseskan program-program pemerintah Desa Sidoluhur”<sup>93</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut, menandakan bahwa masyarakat sudah dapat memahami upaya integrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidoluhur. Oleh sebab itu, hal semacam ini perlu dipertahankan kalau bisa ditingkatkan.

#### 4. Fungsi Latensi

Pada teori ini, pemerintah diupayakan untuk merangkul seluruh lapisan lembaga dan masyarakat dalam

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Sukendro selaku masyarakat Desa Sidoluhur pada hari Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 20.00 WIB.

program pembangunan, dengan tujuan untuk memotivasi terkait kegiatan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah Desa Sidoluhur menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek akan tetapi juga subjek pembangunan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi mereka.

Menurut tokoh agama di Desa Sidoluhur, Bapak Suwito menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur sudah dapat dirasakan terutamanya dalam bidang keagamaan. Infrastruktur desa yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa telah memudahkan masyarakat menuju ke masjid ataupun menuju tempat-tempat yang dianggap suci lainnya. Salah satu contohnya adalah pemerataan jalan aspal ataupun beton. Fasilitas umum tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam menempuh perjalanan ke masjid ataupun *punden* sebagai tempat yang dianggap keramat di Desa Sidoluhur. Sedangkan dari segi pemberdayaan masyarakat, dana desa telah menyumbangkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat positif bagi moral masyarakat Desa Sidoluhur seperti pengajian akbar setiap hari-hari besar. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Bapak Suwito menyampaikan:

“Pembangunan sesudah adanya dana desa dapat dirasakan, terutama dalam bidang keagamaan. Infrastruktur yang dibangun memudahkan masyarakat untuk pergi ke masjid dan *Punden*. Infrastruktur yang

dimaksud adalah pemerataan jalan. Jalan yang baik memudahkan masyarakat ketika ingin ke masjid. Ketika dulu mau ke masjid jalannya jelek dan ketika hujan, jalannya menjadi becek, masyarakat tidak nyaman untuk pergi ke masjid. Selain itu, punden sekarang juga sudah dibangun dengan baik sehingga sudah tidak seram seperti dulu lagi. Untuk pemberdayaan, dengan adanya desa pemberdayaan dapat dirasakan khususnya untuk bidang keagamaan. Setiap hari-hari besar seperti idul fitri dan idul adha pasti pemerintah Desa Sidoluhur mengadakan pengajian akbar yang itu bagus untuk moral masyarakat.”<sup>94</sup>

## **B. Aspek-Aspek Pembangunan yang Didanai Dana Desa**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan itu memiliki banyak aspek. Misalnya pembangunan fisik, non fisik, pelayanan dasar, lingkungan dan pembangunan lainnya. Adapun pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Sidoluhur adalah sebagai berikut:

### **1. Pembangunan Jalan untuk Mobilitas**

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Pasalnya, pembangunan infastruktur adalah salah satu cara untuk mempercepat skala pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memudahkan mobilitas dan aktivitas-aktivitas masyarakat. Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga sangat berpengaruh

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Suwito selaku Tokoh Agama pada hari Jum'at, 26 April 2019, Jam 20.00 WIB.

terhadap segala sektor. Salah satu sektor tersebut adalah sektor ekonomi.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya semata-mata untuk memudahkan mobilitas dan akses masyarakat, akan tetapi, pembangunan infrastruktur juga merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan menguatkan budaya gotong royong. Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh masyarakat dan nantinya masyarakat yang ikut berpartisipasi tersebut akan mendapatkan upah. Pemberian upah juga berlaku di Desa Sidoluhur. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara kepada kepala Desa Sidoluhur.

“Masyarakat yang ikut dalam pembangunan infrastruktur desa tidak hanya mendapatkan keringat, akan tetapi mereka akan mendapatkan upah sekitar 80-90 an ribu rupiah per hari, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan ekonomi mereka”.<sup>95</sup>

Biasanya proyek pembangunan yang dilakukan dapat berjalan selama 1 bulan. Kalau penghasilan 1 hari masyarakat yang ikut berpartisipasi tersebut antara 80-90 ribu rupiah per hari, maka 1 bulan dapat 2,4 juta- 2,7 juta-an. Hal itu membuktikan bahwa pembangunan sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat yang mengikuti pembangunan tersebut.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur pada Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.

Salah satu infrastruktur yang dibangun di Desa Sidoluhur adalah pembangunan jalan, karena pembangunan jalan merupakan akses vital masyarakat untuk melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya misal pergi ke pasar, sawah, sekolah dan lain sebagainya.

“Pembangunan yang setiap tahun selalu dilakukan adalah pembangunan jalan. Dari dulu kami, selalu membangun infrastruktur jenis ini, karena infrastruktur ini merupakan sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Upah yang kami dapat setelah membangun jalan adalah sekitar 80-90 ribu per hari.”<sup>96</sup>

Selain itu, pembangunan jalan juga bermanfaat untuk memperkuat gotong royong antar masyarakat. Dalam konteks ini, semua elemen masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, baik yang muda maupun yang tua. Semua ikut dalam kegiatan tersebut. Mereka bersama-sama membangun infrastruktur demi kemajuan desa mereka. Pembangunan infrastruktur melalui dana desa merupakan langkah untuk mengembalikan budaya paguyuban yang selalu mengedepankan gotong royong yang mulai terkikis oleh kemajuan teknologi.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2018, Pemerintah Desa Sidoluhur telah membangun jalan di

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Nur selaku tokoh masyarakat pada hari Sabtu, 27 April 2019, Jam 20.00 WIB.

dusun-dusun dengan konstruksi cor beton. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Sidoluhur telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 700.796.000, dan dana yang digunakan bersumber dari dana desa.

## 2. Pembangunan dalam Aspek budaya

Mayoritas agama di Desa Sidoluhur adalah Islam. Akan tetapi, masyarakat masih menganut paham animisme dan dinamisme. Salah satu tempat yang dipercaya merupakan makam dari orang yang penggagas berdirinya Desa Sidoluhur adalah makam mbah jakabaya. Orang-orang sekitar menyebut tempat tersebut sebagai telaga karena menurut cerita yang berkembang di tempat tersebut merupakan bekas pijakan kaki orang belanda yang sakti sehingga dari pijakan tersebut muncul air dan membentuk sebuah telaga. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat.

“Di sini, ada tempat yang dipercaya sebagai makam atau petilasan dari penggagas berdirinya Desa Sidoluhur. Nama beliau adalah Jakabaya. Akan tetapi, orang-orang di desa ini lebih menyebut makam tersebut sebagai telaga. karena dulunya konon tempat tersebut merupakan bekas pijakan kaki dari orang sakti belanda yang mana pijakan tersebut dapat mengeluarkan air dan tempat tersebut membentuk sebuah telaga. Akan tetapi, sekarang tidak ada airnya.”

Pemerintah Desa Sidoluhur bersama dengan masyarakat sekitar membahas terkait dengan kearifan lokal tersebut dalam forum MUSDES (Musyawarah Desa). Oleh sebab itu, dalam forum tersebut diputuskan bahwa tempat tersebut harus direnovasi agar tempatnya tampak lebih indah untuk dipandang dan juga nyaman ketika ada orang berkunjung ke tempat tersebut. Dalam hal ini, pemerintah merenovasi tempat ini dengan anggaran total Rp. 125.300.000 yang diambil dari dana desa.

### 3. Pembangunan dalam Aspek Kesehatan (Posyandu)

Dalam UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992, dinyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.<sup>97</sup>

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan

---

<sup>97</sup> Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. (Jakarta, 2016,) hal 1.

angka kematian ibu dan bayi.<sup>98</sup> Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu hamil dan anak balita, Pemerintah Desa Sidoluhur menyelenggarakan program pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di dusun-dusun Desa Sidoluhur. Adapun jumlah pos yang sudah dibangun ada sejumlah 5 buah.

Pemerintah Desa Sidoluhur mengalokasikan dana dari program dana desa sebesar Rp. 16.000.000, pada tahun 2018 untuk mendirikan bangunan ataupun prasarana lain yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan terutama untuk kenyamanan pada kegiatan pelayanan kesehatan bagi bayi, balita, ataupun ibu hamil. Dalam wawancara dengan Ibu Pariyem menyampaikan bahwa:

“Dalam pembangunan dalam bidang kesehatan, kami membangun Posyandu di setiap dusun. Itu adalah langkah untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada ibu hamil dan anak bali di Desa Sidoluhur. Dalam hal ini, kami bekerjasama bidan desa, Alhamdulillah pelaksanaan Posyandu bisa dilakukan di setiap pos sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kami juga menyediakan timbangan bayi, alat cek ibu hamil”<sup>99</sup>.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, disertai dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Desa Sidoluhur berharap

---

<sup>98</sup>Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*..., hal 1.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur pada Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.



masyarakat Sidoluhur terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal.

#### 4. Pembangunan dalam Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dengan pendidikan, manusia akan mengetahui kebaikan dan keburukan, sehingga diharapkan pendidikan mampu meningkatkan kualitas akal, emosional maupun spiritual. Dengan demikian, pendidikan harus selalu ditekankan oleh semua pihak termasuk pihak pemerintah.

Pemerintah Desa Sidoluhur telah berusaha keras untuk memajukan pendidikan di Desa Sidoluhur. Hal ini dapat dilihat dari segi pembangunannya. Dalam konteks ini, dapat dilihat dari pembangunan gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa Sidoluhur. Dalam pembangunan gedung PAUD tersebut, total anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 126.109.800. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Sidoluhur.

“Pemerintah desa telah membangun gedung PAUD. Dulunya PAUD di desa ini tidak ada akan tetapi setelah adanya dana desa pada tahun 2015. Gedung PAUD didirikan pada tahun itu juga. Dan itu tentu bisa memberikan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya untuk bersekolah ke PAUD tersebut karena aksesnya yang mudah dan cepet”.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Eri selaku guru PAUD pada hari Kamis, 25 April 2019, Jam 10.00 WIB.

Pembangunan PAUD di Desa Sidoluhur dilakukan karena melihat sarana gedung pendidikan untuk anak-anak belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks ini, Desa Sidoluhur hanya memiliki Taman Kanak-Kanak (TK) akan tetapi untuk anak usia dini belum dapat terealisasi. Oleh sebab itu, pemerintah Desa Sidoluhur membangun gedung tersebut, supaya anak usia dini dapat belajar dengan akses yang mudah, murah dan nyaman. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan kepala Desa Sidoluhur.

“pembangunan gedung PAUD ini dilakukan atas dasar keprihatinan kami sebagai aparat desa terhadap pendidikan anak usia dini. Selama ini, pendidikan di Desa Sidoluhur hanya terfasilitasi di TK, SD dan SMP akan tetapi untuk tingkat PAUD belum ada. Maka dari itu, masyarakat banyak memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak adanya sarana. Oleh sebab itu, gedung PAUD kami rancang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan PAUD.”

Selain itu, PAUD ini juga memberikan keuntungan ekonomi bagi guru yang mengajar dalam gedung PAUD tersebut. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara Kepala Desa Sidoluhur, pekerjaan tersebut mendapatkan tunjangan setiap bulannya sebesar 100 ribu rupiah. Gaji tersebut diambil

dari bunga peminjaman modal usaha yang dikelola oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

“Guru PAUD yang honorer dan belum mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. upahnya sementara akan ditanggung oleh pemerintah desa Sidoluhur. Ya, walaupun upah tersebut tidak seberapa, tapi setidaknya mereka ada pemasukan. Mereka ngajar masak gk dikasih gaji, kan kasihan.”<sup>101</sup>

Hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu guru PAUD di Desa Sidoluhur.

“memang benar setiap bulan guru honorer mendapatkan upah sebesar 100 ribu rupiah. Meskipun demikian, beliau mengatakan bahwa upah tersebut tidak cukup untuk membantu ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, beliau juga bekerja sebagai buruh tani untuk membantu ekonomi keluarga.”<sup>102</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat sisi ekonomi yang didapat dari pembangunan gedung PAUD di Desa Sidoluhur. walaupun upah yang diterima tidak seberapa akan tetapi setidaknya dapat digunakan untuk menambah ekonomi keluarga.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur pada Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Eri selaku guru PAUD pada hari Kamis, 25 April 2019, Jam 10.00 WIB.

## 5. Pembangunan dalam Aspek Peningkatan Ekonomi

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.<sup>103</sup>

Pada tahun 2015, Pemerintah Desa Sidoluhur membentuk BUMDES dan sekaligus gedung operasionalnya. Dalam konteks ini, BUMDES didirikan dalam rangka mewujudkan permodalan yang merakyat bagi masyarakat Desa Sidoluhur. Selain itu, BUMDES tersebut dikelola oleh masyarakat asli Desa Sidoluhur. Adapun salah satu program yang dicanangkan oleh BUMDES adalah modal usaha untuk masyarakat yang sedang memiliki usaha maupun baru memiliki keinginan untuk berwirausaha.

---

<sup>103</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_usaha\\_milik\\_desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa) diakses Minggu, 26 Mei 2019, Jam 20.49 WIB.

Modal usaha dari BUMDES sangat bermanfaat untuk masyarakat karena dapat menjadi modal awal bagi pengusaha pemula yang baru merintis usahanya maupun menambah modal usaha bagi masyarakat Desa Sidoluhur yang sudah memiliki usaha. Beliau mengatakan bahwa hampir 100 persen masyarakat yang memiliki usaha maupun baru merintis usaha sering meminjam modal usaha di BUMDES. Mayoritas pengusaha yang meminjam di BUMDES adalah pengusaha kerupuk seperti, kerupuk semier, ereng-ereng dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Sidoluhur merupakan salah satu donatur yang memberikan memberikan dana besar yang diambilkan dari dana desa sebagai modal pembangunan dan pengembangan BUMDES. Hal ini dapat dilihat total keseluruhan dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sidoluhur dari tahun 2016-2018 yaitu, sebesar Rp. 233.044.200,-.<sup>104</sup> Ibu Pariyem menyampaikan:

“Modal usaha ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sidoluhur. Karena dengan modal ini masyarakat dapat memulai usaha ataupun bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha setidaknya bisa menambah modal usaha sehingga usahanya lebih berkembang. Selama ini, sejak tahun 2016-2018 melalui dana desa pemerintah desa sidoluhur telah memberikan dana sebesar 200 jutaan-an lebih untuk dana pembangunan gedung BUMDES dan pengembangannya.”<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Rancangan RPJM Desa Sidoluhur yang sudah terealisasi diakses pada hari Rabu, 26/06/2019, Jam 10.01.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Pariyem selaku Kepala Desa Sidoluhur pada Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.

Menurut Bapak Gunadi selaku Ketua BUMDES menyampaikan bahwa BUMDES sejauh ini sudah memberikan kontribusinya dalam dunia usaha yaitu, dalam bidang usaha. Adapun syarat dan ketentuan peminjaman modal usaha di BUMDES adalah Masyarakat Desa Sidoluhur dan Adanya keinginan untuk berwirausaha. Sedangkan untuk modal usaha yang dapat dipinjamkan adalah minimal sebesar 1 juta-an dan maksimal 5 juttaa-an, bunga peminjaman sebesar 7 persen. Adapun aturan setelah meminjam modal usaha yaitu, pembayaran harus tepat waktu sesuai dengan bulan yang ditentukan. Apabila aturan tersebut tidak dijalankan, maka pihak BUMDES akan memberikan sanksi berupa tidak boleh meminjam modal usaha kembali ke BUMDES.<sup>106</sup>

Setiap tahun dana yang diperoleh juga cukup lumayan besar. Menurut beliau, setiap tahun biasanya mendapatkan dana 30 juta rupiah. Dana tersebut sementara hanya digunakan untuk peminjaman modal usaha. Akan tetapi, dikarenakan gedung BUMDES sudah jadi dan sudah boleh dioperasikan, maka BUMDES akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pertanian seperti pupuk, benih padi dan lain sebagainya pada tahun yang akan datang.

Sedangkan menurut Ibu Pasri selaku peminjam modal usaha di BUMDES Desa Sidoluhur menyampaikan bahwa modal

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Gunadi selaku Ketua BUMDES pada hari Kamis, 25 April 2019, Jam 14.00 WIB.

usaha dari BUMDES sangat bermanfaat untuk menambah modal dagangannya. Beliau merupakan pengusaha kerupuk kempling yang biasanya dijual dengan sangat murah yaitu satu kerupuk hanya Rp. 400,-. Biasanya beliau menjual sekitar 200 kerupuk di pasar. Jadi, jika harga Rp. 400,- dan beliau menjual 200 kerupuk, maka sekali penjualan beliau akan mendapatkan penghasilan Rp.80.000,-. Akan tetapi, sayangnya beliau tidak menjual setiap hari karena pasar yang dekat dengan rumah beliau hanya buka 3 kali dalam seminggu.<sup>107</sup>

Di sisi lain, pemerintah Desa Sidoluhur hanya memberikan modal usaha bagi masyarakat, tetapi tidak ada pendampingan yang jelas terhadap penggunaan modal usaha tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari perkataan Ibu Yati yang meminjam uang ke modal usaha sebesar Rp. 2000.000,- akan tetapi beliau menggunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan sehari-hari, sekolah dan lain sebagainya dan tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu, membuka usaha. Ibu Yati mengatakan:

“Saya pernah meminjam 2 juta untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan untuk kebutuhan pendidikan anak. Saya bilang ke pihak BUMDES sih untuk berwirausaha, tapi karena menurut saya wirausaha itu sulit maka saya rasa lebih baik uang itu untuk kebutuhan sehari-hari saja. Saya berani

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Pasri pada hari Jum'at, 25 April 2019, Jam 17.00 WIB.

kayak gini yak arena tidak ada yang mengawasi dari pihak BUMDES atau Pemerintah Desa”<sup>108</sup>.

Hal ini menandakan bahwa aspek pengawasan dari pemerintah terhadap program yang ada masih kurang. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan pengawasan yang ketat agar program dapat berjalan sesuai harapan.

#### 6. Pembangunan dalam Aspek Keolahragaan

Dalam aspek ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sejumlah Rp.20.600.000., dalam pembangunan keolahragaan di Desa Sidoluhur. Pemerintah mencoba mendengarkan aspirasi daripada pemuda di Desa Sidoluhur untuk merenovasi lapangan sepakbola yang mana rumputnya tidak layak untuk digunakan dalam lapangan. Oleh sebab itu, pemerintah merenovasi lapangan tersebut dengan rumput berkualitas baik, sehingga ketika hujan tidak cepat rusak. Hal ini diperkuat melalui wawancara kepala desa berikut ini.

“Pemerintah mencoba mendengarkan aspirasi daripada pemuda yang menginginkan agar lapangan sepakbola di Desa Sidoluhur jelek karena guyuran hujan yang sangat deras. Oleh sebab itu, kami membeli rumput kualitas baik sehingga pemuda dapat merasakan rumput yang bagus seperti di stadion beneran”<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Kepala Desa, Ibu Pariyem, Selasa, 23 April 2019, Jam 18.30 WIB

<sup>109</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sidoluhur pada hari Senin, 22 April 2019, Jam 20.00 WIB.



Walaupun demikian, masih beberapa aspek yang belum dapat direalisasikan oleh pemerintah desa. Fasilitas-fasilitas tersebut misal gedung serba guna. Dengan adanya gedung tersebut, jenis olahraga yang dimainkan dapat bervariasi, sehingga diharapkan akan muncul bakat-bakat yang dapat membanggakan desa dalam bidang olahraga. Hal ini disebabkan oleh pembuatan gedung tersebut terlalu memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga pembangunan gedung tersebut ditunda terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka untuk melihat kesesuaian antara penelitian dengan teori, maka seluruh aspek di atas harus dikaitkan dengan teori AGIL. Oleh sebab itu, berikut hubungan setiap aspek yang dipandang melalui teori tersebut:

#### 6. Fungsi adaptasi

Dilihat dari sisi fungsi adaptasi, hubungan dari keenam program tersebut sudah cukup bagus. Artinya adaptasi dari program-program pembangunan di Desa Sidoluhur sudah mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan juga lingkungannya. Salah satu aspek yang dapat terpenuhi dengan baik adalah aspek kebudayaan atau kearifan lokal. Pada aspek ini, pemerintah Desa Sidoluhur telah berhasil mengalokasikan dana desa dengan baik untuk merenovasi makam mbah Jakabaya selaku penggagas berdirinya Desa Sidoluhur.

Akan tetapi, terdapat satu aspek yang tampaknya perlu untuk ditingkatkan yaitu, peningkatan sarana dan prasarana

olahraga. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan tokoh pemuda.

“Dalam Musdes, Kami mengusulkan program pemerintah agar memperbaiki dan menambah fasilitas olahraga di Desa Sidoluhur seperti lapangan sepakbola karena kondisinya buruk akibat dari curah hujan yang tinggi. Selain itu, kami mengusulkan agar membuat lapangan voli dan gedung serba guna”.<sup>110</sup>

#### 7. Fungsi *Goal attainment*

fungsi *goal attainment* pemerintah Desa Sidoluhur sudah mulai berfungsi dengan baik. Artinya, pemerintah desa mulai memahami tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sidoluhur. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Sidoluhur.

“Program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah berjalan baik dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misal jalan menuju sawah yang mana sudah agak lebar dibanding sebelum adanya dana desa”.<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, pembangunan yang dicantumkan dalam program kerja mereka sesuai dengan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Jari selaku Ketua Komunitas Mersol pada hari Rabu, 22 Mei 2019, Jam 13.00 WIB.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Sukendro selaku masyarakat Desa Sidoluhur pada hari Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 20.00 WIB.

kehendakhati dan kebutuhan rakyat. Hal ini dapat menimbulkan kepercayaan yang baik terhadap pemerintah.

#### 8. Fungsi Integrasi

Teori ini ditujukan untuk persatuan antar warga masyarakat di Desa Sidoluhur. Dalam konteks ini, pemerintah Desa Sidoluhur dianggap sudah berhasil mengupayakan gotong royong yang ada di Desa Sidoluhur. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh agama.

“Masyarakat sangat antusias dalam membangun infrastruktur di Desanya. Karena di sini, budaya gotong royong masih sangat melekat. Selain itu, hal ini juga didukung upah yang didapat ketika mengikuti kegiatan ini. Apabila ikut membangun infrastruktur, maka akan mendapatkan upah yang cukup lumayan. Dulu, sebelum adanya upah hanya 70-80 ribu rupiah. Akan tetapi, setelah adanya dana desa naik menjadi 80-90 ribu rupiah. Masyarakat biasanya didominasi oleh orang-orang tua, karena pemuda di sini kebanyakan pada merantau ke luar kota.”<sup>112</sup>

Hal ini menandakan bahwa sistem upah yang ada dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Sidoluhur menambah fungsi integrasi semakin efektif. Artinya, finansial dapat mendorong masyarakat untuk selalu bergotong royong dan menjaga persatuan.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Suwito pada hari Jum'at, 26 April 2019 WIB, Jam 20.00 WIB.

## 9. Fungsi Latensi

Pada teori ini, pemerintah diharuskan diupayakan untuk tetap menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan di Desa Sidoluhur. Dengan tujuan, semangat persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat di Desa Sidoluhur dapat selalu terjaga ataupun ditingkatkan. Oleh sebab itu, pemerintah desa sudah memberikan program yang dapat memberikan efek persatuan dan kesatuan antar warga. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara kepada salah satu warga Desa Sidoluhur.

“Pemerintah Desa Sidoluhur selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, baik dari tahap perencanaan pembangunan maupun tahap melaksanakan pembangunan. Hal itu bisa dilihat dari masyarakat yang dilibatkan dalam MUSDUS maupun MUSDES serta pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh masyarakat”

Dari wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki cukup kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mencoba menyatukan persepsi dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga diharapkan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dana Desa adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan Pembangunan masyarakat atau dalam istilah lain *community development* mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan. Keduanya saling berhubungan yang mana dana desa digunakan untuk membangun desa, baik secara fisik maupun non fisik.

Pembangunan masyarakat di Desa Sidoluhur sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidoluhur berjalan begitu masif. Hal ini diakibatkan oleh dana desa yang cukup besar yang didapat oleh Desa Sidoluhur. Pembangunan tersebut juga berdampak kepada ekonomi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastruktur yang bersifat untuk memudahkan mobilisasi misal jalan ataupun jembatan. Akan tetapi, pembangunan juga dilaksanakan dalam bidang yang lain, misal dalam bidang pendidikan, ekonomi, olahraga da lain sebagainya.

## **B. SARAN**

Setelah memaparkan hasil penelitian, analisis dan juga kesimpulan, maka peneliti akan memberikan beberapa saran untuk Desa Sidoluhur yaitu;

1. Saran untuk pemerintah Desa Sidoluhur
  - a. Pembangunan masyarakat seharusnya tidak hanya pada bidang infrastruktur. Akan tetapi pembangunan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menggali potensi dan bakat masyarakat Desa Sidoluhur, sehingga diharapkan masyarakat dapat berkembang menuju perekonomian yang lebih baik. Contoh, pembangunan irigasi.
  - b. Pemerintah harus menguatkan internal lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi yang bernaung di dalam maupun luar pemerintahan desa, sehingga diharapkan lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi tersebut dapat bersinergi membangun Desa Sidoluhur menuju kemajuan.

2. Saran untuk Masyarakat Desa Sidoluhur

Masyarakat Desa Sidoluhur harus meningkatkan sinergitasnya dengan pemerintah desa. Masyarakat harus lebih kritis dalam mengkritik maupun memberikan saran kepada pemerintah desa, sehingga program-program kerja pemerintah menjadi lebih berkualitas dan juga

berorientasi meningkatkan taraf hidup maupun ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Herman. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi (Dari Klasik Sampai Modern)*. (Yogyakarta: IRCiSoD,2015).
- Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Appelrouth, *Scott and Laura Desfor Edles. Classical and Contemporary Sociological Theory; Text and Readings*. (California: SAGE Publications, Inc, 2016).
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Prenada Media Group: Jakarta,2007).
- Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Hamilton, Peter. *Talcot Parsons dan Pemikirannya*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogja, 1990).



- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015).
- Indrayani, Damsar, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Jamaludin, A N. *Sosiologi Pedesaan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Post Modern, dan Pos-Kolonial*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode baru*. ( Jakarta, UI press, 1992).
- Parsons, Talcot. *The Social System*. (London: Routledge 11 New Fetter Lane, 1991).
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. *Kajian Dana Desa di Jawa Tengah*. (Jakarta; Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2018).
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Post Modern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana, 2014).

- Rapley, John. *Undestanding Development; Theory And Practice in Third World*, (Lynne Rienner Publisher: Boulder, USA, 2007).
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset; Sumber Daya Manusia*. (Graha Ilmu: Yogyakarta: 2004).
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012).

### **Jurnal dan Skripsi**

- Arie D. P. Mirah, Vicky V. J. Panelewen, Feiby Vencentia Tangkumahat. Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Jurnal Agri Sosio-Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907– 4298 ,Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335 – 342.
- Florensi, Helen. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri *Jurnal Kebijakan dan Managemen Publik*, Volume 2, No.1 (Januari 2014).
- Maulana, M Indra. Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari *Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di desa sinar Palembang kec. candipuro, kab. lampung selatan)*. (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).
- Mardha Adhi Pratama, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi dan Muhammad Eko Atmojo. Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo, *Jurnal Sosial Politik Humaniora*. Volume 5 No. 1 Tahun 2017.

- M. Faisal Abdullah, Intan Mala Sari. Analisis Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 15. No.01 (Juni 2017).
- Mawar Suryaningtyas, Lina Nasihatun Nafidah. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 3, No. 1 (Juni 2015).
- Muhammad Arif Nasution, Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tetelesi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 10, No. 1 (Juni 2018).
- Nugraha, Rivan. *Peran Program Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)*. (Bandung: UIN Sunan Gunungjati, 2017).
- Suwondo, Ratih Nur Pratiwi, Chandra Kusuma Putra. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. No. 6. Hal. 1203-1212.

## **Website**

<https://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada Sabtu, 9/3/2013 jam 13.39.

[http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi\\_pengertian-pemanfaatan.html](http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi_pengertian-pemanfaatan.html) diakses pada hari Sabtu, 9/3/2013 jam 13.39 WIB.

<https://www.bphn.go.id>, diakses pada hari Sabtu, 9/3/2019 jam 13.39 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada hari Selasa 12/3/2019 jam 20.21 WIB.

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses pada hari Selasa 12/3/2019 jam 20.21 WIB.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Waktu / Tempat :

1. Adakah pembangunan sebelum adanya Dana Desa?
2. Bagaimana bentuk pembangunan sebelum adanya Dana Desa?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebelum adanya Dana Desa?
4. Bagaimana bentuk pembangunan setelah adanya Dana Desa?
5. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Desa Sidoluhur?
6. Bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan masyarakat?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat setelah adanya Dana Desa?
8. Seberapa efektifkah pembangunan setelah adanya Dana Desa?
9. Apa program pembangunan yang sudah terealisasi?

## RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirur Rijal  
Alamat Asal : Ds. Sidoluhur RT/RW 02/02,  
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 1 Pebruari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Bina Insani  
Perumahan Ringinsari 2, Ngaliyan  
Semarang  
No Hp/Email : 0895386477215/dan  
Khoirulrizal15@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Sidoluhur 02, Lulus Tahun 2008
2. MTs N Sumber, Lulus Tahun 2011
3. MA Raudlatussy Syubban, Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Juli 2019  
Hormat saya,

**CHOIRUR RIJAL**  
**1506026024**